



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2025-2029



DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Jalan H. Muhammad Sani – Pulau Dompok – Tanjungpinang
eMail : disperkim.prov@gmail.com



KATA PENGANTAR

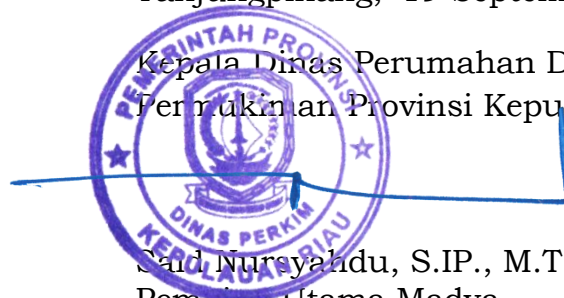
Puji Syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan Rahmat dan HidayahNYA sehingga Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029 dapat diselesaikan pada waktu yang ditetapkan.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029, penyelarasan RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029, sehingga menjadi pedoman perencanaan tahunan, dalam mendukung visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur untuk mewujudkan **“Kepulauan Riau Maju, Makmur Dan Merata”**. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Tahun 2025-2029, pedoman dalam mewujudkan kualitas kinerja secara terukur, mendorong peningkatan kinerja demi terwujudnya pemerintahan yang akuntabel dan *Good Government*.

Demikian Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029, ini dibuat dan disusun dengan penuh tanggung jawab, semoga bermanfaat.

Tanjungpinang, 19 September 2025

Kepala Dinas Perumahan Dan Kawasan
Permukiman Provinsi Kepulauan Riau,



Said Nursyahdu, S.IP., M.T.

Pemimpin Utama Madya

NIP. 19720618 200012 1 004



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
BAB I PENDAHULUAN	9
1.1. Latar Belakang	9
1.2. Dasar Hukum Penyusunan	15
1.3. Maksud Dan Tujuan	22
1.4. Sistematika Penulisan	22
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	25
2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah	25
2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah ...	52
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN ..	67
3.1. Tujuan Rencana Strategi Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029	67
3.2. Sasaran Rencana Strategi Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029	68
3.3. Strategi Perangkat Daerah Dalam Mencapai Tujuan Dan Sasaran Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029	71



3.4. Arah Kebijakan Perangkat Daerah Dalam Mencapai Tujuan Dan Sasaran Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029	72
 BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN	75
4.1. Uraian Program	77
4.2. Uraian Kegiatan	81
4.3. Uraian Sub Kegiatan Beserta Kinerja, Indikator, Target, Dan Pagu Indikatif	104
4.4. Uraian Sub Kegiatan Dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	142
4.5. Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan Dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah	146
4.6. Target Kinerja Penyelenggara Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)	147
 BAB V PENUTUP	149



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Aparatur Sipil Negara (ASN) Berdasarkan Gender	37
Tabel 2.2.	Pegawai Negeri Sipil (PNS) Berdasarkan Jabatan	38
Tabel 2.3.	Aset Tetap Peralatan Dan Mesin	40
Tabel 2.4.	Capaian Kinerja Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau Berdasarkan Tujuan pada Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026	43
Tabel 2.5.	Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau Berdasarkan Tujuan pada Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026	44
Tabel 2.6.	Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau Berdasarkan Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026	46
Tabel 2.7.	Pemetaan Permasalahan Dalam Penentuan Prioritas Dan Sasaran Pembangunan Daerah pada Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029	53
Tabel 2.8.	Permasalahan dan Upaya Pemecahan Masalah Pelaksanaan Penyelenggaraan SPM Urusan Perumahan Rakyat	54
Tabel 2.9.	Data Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Provinsi Kepulauan Riau Pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029	60
Tabel 2.10.	Data Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) 10 Ha s.d di Bawah 15 Ha di Provinsi Kepulauan Riau Pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029	62



Tabel 2.11. Data Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) 10 Ha s.d di Bawah 15 Ha di Provinsi Kepulauan Riau Pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029	64
Tabel 2.12. Data <i>Backlog</i> Kepemilikan Rumah di Provinsi Kepulauan Riau Pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029	66
Tabel 3.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029	70
Tabel 3.2. Tujuan, Sasaran, Strategi Dan Kebijakan Jangka Menengah Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029	73
Tabel 4.1. Uraian Program Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029	78
Tabel 4.2. Uraian Kegiatan Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029	83
Tabel 4.3. Uraian Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029	105
Tabel 4.4. Uraian Sub Kegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029	144
Tabel 4.5. Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029	146



Tabel 4.6. Indikator Kinerja Kunci (IKK) Outcome Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029	148
---	-----



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Struktur Organisasi Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau	36
--	----



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor ... Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029.
- Lampiran 2 Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor Tahun 2025 tentang Inidkator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029.
- Lampiran 3 Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 3117/KPTS-7/I/2025 tentang Tim Penyusunan Dokumen Rencana Strategis Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029.
- Lampiran 4 Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor / KPTS-7/IX/2025 tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029.



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan rencana strategis perangkat daerah (Renstra PD), merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk jangka menengah selama priode 5 (lima) tahun, yang disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pasal 272 (1) Perangkat Daerah menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada RPJMD; (2) Rencana strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintah Wajib dan/atau Urusan Pemerintah Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah; (3) Pencapaian sasaran, Program, dan kegiatan pembangunan dalam rencana strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam rencana strategis kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional. Pasal 273 (1) Rencana strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 272 ayat (1) ditetapkan dengan Perkada setelah RPJMD ditetapkan; (2) Rencana strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan ke dalam rancangan rencana kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD; (3) Rencana kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah; (4) Rencana kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud



pada ayat (3) ditetapkan kepala daerah setelah RKPD ditetapkan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Dokumen Renstra perangkat daerah merupakan dokumen yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai tugas dan fungsi setiap perangkat daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD yang bersifat indikatif.

Dokumen Renstra Perangkat Daerah memiliki kedudukan yang sangat strategis sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang disusun setiap tahun selama kurun waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan periode Rensta Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah juga menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Perangkat Daerah, baik evaluasi Renstra sendiri maupun evaluasi Renja Perangkat Daerah. Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029, berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029.

Proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah meliputi (1) persiapan penyusunan (2) penyusunan Rancangan Awal (3) penyusunan Rancangan (4) penyusunan Rancangan Akhir dan (5) penetapan Renstra Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan lain baik di Tingkat Nasional maupun Provinsi. Keterkaitan Renstra Kementerian/Lembaga (K/L), Renstra



Perangkat Daerah, dan Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan yang digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah setiap tahun anggaran.

Penyusunan Renstra Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029 ini sangat ditentukan oleh kemampuan perangkat daerah dalam mengimplementasikan Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029 dan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai kewenangan daerah ke dalam penyusunan Renstra yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau. Selain itu, proses Penyusunan Renstra Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029 dilaksanakan secara transparan, efektif, efisien, terukur, akuntabel, inovatif, kreatif, berorientasi pada hasil (*outcome*), serta berbasis resiko (*riskbased planning*).

Dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, Renstra Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029 ini berfungsi memudahkan melakukan kontrol terhadap semua program kegiatan baik yang sedang berlangsung maupun yang akan datang, dapat mengukur hasil (*outcome*) yang harus dicapai dari target yang ditetapkan. Renstra ini juga dapat dijadikan sebagai sarana untuk meminimalisir resiko dan mengoptimalkan hasil yang akan dicapai dan sebagai alat untuk mengukur kemajuan pelaksanaan tugas. Renstra Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029 memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan baik di tingkat Nasional, Provinsi maupun Kabupaten/Kota.



Penyusunan Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029 mengacu pada tugas dan fungsi perangkat daerah sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah. Selain itu, Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029 juga memperhatikan Renstra Kementerian/Lembaga terkait, yaitu antara lain Renstra Kementerian Perumahan Dan Kawasan Permukiman (KemenPKP). Pencapaian sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2025-2029 diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029 dan dokumen perencanaan kementerian/lembaga terkait, yakni dalam meningkatkan penyediaan akses perumahan dan infrastruktur permukiman yang layak, aman, dan terjangkau.

Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029 juga memiliki keterkaitan dengan SPM Perumahan Rakyat. Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum Dan Bidang Perumahan Rakyat. Standar Pelayanan Minimal sub urusan pekerjaan umum dan sub urusan perumahan rakyat yang selanjutnya disebut SPM Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar sub urusan pekerjaan umum dan sub urusan perumahan rakyat yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga Negara secara minimal.



Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Perumahan Rakyat Daerah Provinsi terdiri atas:

1. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi; dan
2. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Provinsi.

Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana, dapat dilaksanakan melalui:

- a. Rehabilitasi rumah;
- b. Pembangunan kembali rumah;
- c. Pemukiman kembali; atau
- d. Bantuan akses Rumah Sewa Layak Huni, berupa subsidi uang sewa, atau akses tinggal Rumah Sewa Layak Huni milik Pemerintah Daerah.

Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana dapat dilakukan dengan ketentuan:

- a. Dilaksanakan saat masa pasca bencana;
- b. Terdapat surat penetapan status bencana dari Kepala Daerah;
- c. Sesuai jumlah unit rumah rusak yang akan ditangani dalam dokumen Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah dilaksanakan melalui:

- a. Penggantian hak atas penguasaan tanah dan/atau bangunan, yang terdiri dari penggantian uang dan/atau pembangunan kembali; atau
- b. Bantuan akses Rumah Sewa Layak Huni.



Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah dapat dilakukan dengan ketentuan:

- a. Terdapat Surat Penetapan Kepala Daerah bahwa Daerah tersebut termasuk ke dalam program Pemerintah Daerah untuk direlokasi; dan
- b. Sesuai jumlah rencana Rumah Tangga yang akan ditangani dalam dokumen Rencana Aksi dan pelaksanaan pemenuhannya dapat dilakukan secara bertahap.

Bencana adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam yang berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, kebakaran hutan dan alam, serta tanah longsor.

Relokasi Program adalah kegiatan memindahkan keluarga, rumah tangga, atau masyarakat yang bertempat tinggal di atas lahan bukan fungsi permukiman dan tempat yang berpotensi dapat menimbulkan bahaya dengan status penguasaan bangunan hak milik atau bangunan hak sewa pada lahan dengan status hak pakai, hak guna usaha, atau pemanfaatan.

Rumah Layak Huni adalah rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya.

Program prioritas nasional dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029, merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam menselaraskan penyusunan Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029.

Proses penyusunan Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029 dilakukan



mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Serta Kepmendagri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Dokumen rencana strategis (Renstra) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029 memiliki kedudukan dan fungsi yang sangat strategis dalam menyusun dokumen perencanaan tahunan perangkat daerah, yaitu sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang disusun setiap tahun selama kurun waktu 5 (lima) tahun.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan Rencana Strategis Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029, adalah:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia



- Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
 5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana



- Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6323);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624);
 11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
 12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
 13. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional



- (Lampiran Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000);
14. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2025 Tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan Dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender Di Daerah;
 16. Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Dan Pengembangan Perumahan Dan Kawasan Permukiman Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan



- Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
 22. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum Dan Bidang Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1006);
 23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 24. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
 25. Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Perumahan Nomor 06/SE/Dr/2022 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Dan Pengembangan Perumahan Dan Kawasan Permukiman;
 26. Surat Edaran Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Percepatan Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;



27. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 7 Tahun 2011 Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2011 Nomor 17);
28. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 39);
29. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4);
30. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 55);
31. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 60);
32. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Umum Energi Daerah Tahun 2023-2050 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 Nomor 4);
33. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi



- Kepulauan Riau Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 67);
34. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 70);
 35. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Provinsi Kepulauan Riau (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2010 Nomor 19);
 36. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 Nomor 909);
 37. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 26 Tahun 2023 Tentang Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 Nomor 923);
 38. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 60 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026;
 39. Surat Edaran Gubernur Kepulauan Riau Nomor B/000.7.2/414.1/BPPP-SET/2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rancangan Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
 40. Surat Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor B/050.3/1235/BPPP-SET/2024 Tentang Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.



1.3. Maksud dan Tujuan

Adapun maksud penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029 ini adalah sebagai dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029. Sedangkan tujuan disusunnya rencana strategis (Renstra) Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029, adalah sebagai berikut:

1. Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan dalam kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau dalam mendukung Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau selaku Kepala Daerah terpilih;
2. Tolok ukur dalam pelaksanaan program dan kegiatan kurun waktu 5 (lima) tahun, sebagai dasar melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja guna mencapai tujuan dan sasaran organisasi, baik secara kualitatif maupun kuantitatif;
3. Pedoman bagi seluruh bidang-bidang di lingkungan Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, dalam penyusunan perencanaan tahunan.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029 ini secara garis besar disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :



Bab I. Pendahuluan

Menjelaskan secara ringkas mengenai isi dokumen secara keseluruhan meliputi: latar belakang penyusunan dokumen, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan renstra dinas perumahan dan kawasan permukiman provinsi kepulauan riau.

Bab II. Gambaran Pelayanan, Permasalahan Dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Menjelaskan gambaran pelayanan perangkat daerah yang memuat tugas, fungsi dan struktur perangkat daerah, sumber daya perangkat daerah, kinerja pelayanan perangkat daerah, kelompok sasaran layanan, mitra perangkat daerah, dan menjelaskan permasalahan dan isu strategis perangkat daerah yang memuat permasalahan pelayanan perangkat daerah, isu strategis, pada dinas perumahan dan kawasan permukiman provinsi kepulauan riau.

Bab III. Tujuan, Sasaran, Strategi Dan Arah Kebijakan

Menjelaskan tujuan rencana strategis dinas perumahan dan kawasan permukiman provinsi kepulauan riau tahun 2025-2029, dan menjelaskan sasaran rencana strategis dinas perumahan dan kawasan permukiman provinsi kepulauan riau tahun 2025-2029, serta strategi dinas perumahan dan kawasan permukiman provinsi kepulauan riau dalam mencapai tujuan dan sasaran rencana strategis dinas perumahan dan kawasan permukiman provinsi kepulauan riau tahun 2025-2029 dan arah kebijakan dinas perumahan dan kawasan permukiman provinsi kepulauan riau untuk mencapai tujuan dan sasaran rencana strategis dinas perumahan dan kawasan permukiman provinsi kepulauan riau tahun 2025-2029.



Bab IV. Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Menjelaskan uraian program, uraian kegiatan, uraian sub kegiatan beserta kinerja, indikator, target dan pagu indikatif, uraian sub kegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah, target keberhasilan pencapaian tujuan dan dan sasaran rencana strategis dinas perumahan dan kawasan permukiman provinsi kepulauan riau tahun 2025-2029 yang melalui indikator kinerja utama (IKU) dinas perumahan dan kawasan permukiman provinsi kepulauan riau, dan target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintah daerah tahun 2025-2029 melalui indikator kinerja kunci (IKK).

Bab V. Penutup

Bab ini memuat selang pandang kepala perangkat daerah dalam merumuskan dan menjabarkan isi rpjmd provinsi kepulauan riau tahun 2025-2029 kedalam rencana strategis dinas perumahan dan kawasan permukiman provinsi kepulauan riau tahun 2025-2029 dalam mendukung terwujudnya kepulauan riau maju, makmur dan merata



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

a. Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah disusun untuk melaksanakan ketentuan Pasal 232 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Peraturan Pemerintah tersebut dijelaskan, bahwa Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Kewenangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintah Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau meliputi urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman.

Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau dibentuk dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah serta Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau, mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan Pemerintahan di



bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi.

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau dalam melaksanakan tugas di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, juga menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan di bidang Sekretariat, Perumahan, Kawasan Permukiman, Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU);
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang Sekretariat, Perumahan, Kawasan Permukiman, Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU);
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Sekretariat, Perumahan, Kawasan Permukiman, Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU);
4. Pelaksanaan administrasi di bidang Sekretariat, Perumahan, Kawasan Permukiman, Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU); dan
5. Penerapan sistem pengendalian intern pada Perangkat Daerah untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kinerja yang terintegrasi;
6. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada unit kerjanya;
7. Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah secara periodik kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah; dan
8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya fungsi lain yang



diberikan oleh gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Sera Tata Kerja Perangkat Daerah. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau, terdiri atas:

1. Sekretariat;
2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
3. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
4. Bidang Perumahan;
5. Bidang Kawasan Permukiman;
6. Bidang Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU); dan
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

1. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana, program, anggaran, ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, barang milik negara/daerah, arsip dan dokumentasi, serta membantu Kepala perangkat daerah mengkoordinasikan Bidang-Bidang. Dalam melaksanakan tugas Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. menyusun program kerja perangkat daerah;
- b. mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan sekretariat;
- c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan sekretariat;
- d. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan sekretariat;



- e. menyusun dan mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan terkait perencanaan dan keuangan;
- f. menyusun dan mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan terkait umum dan kepegawaian
- g. mengkoordinir pelaksanaan akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi perangkat daerah;
- h. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan sekretariat;
- i. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan sekretariat; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis;

Sekretariat terdiri atas:

- 1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
- 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan bahan kebijakan teknis, pelayanan administrasi perencanaan, keuangan dan pelaporan serta melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan. Uraian tugas sebagai berikut:

- a. merencanakan kegiatan Sub bagian perencanaan dan keuangan;
- b. membagi tugas kepada bawahan;
- c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan sub bagian perencanaan dan keuangan;



- d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan sub bagian perencanaan dan keuangan;
- e. menyiapkan bahan dan mengkoordinasikan perencanaan program kegiatan dan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang perangkat daerah;
- f. menyiapkan bahan perencanaan anggaran dan penyusunan dokumen anggaran;
- g. menyiapkan dan menyusun bahan terkait ketatalaksanaan;
- h. menyiapkan bahan Laporan bulanan, triwulan, semester, tahunan, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, dan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah lingkup perangkat daerah;
- i. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan
- j. melaksanakan verifikasi dan pertanggungjawaban keuangan;
- k. menyiapkan bahan pelaporan keuangan perangkat daerah;
- l. melaksanakan monitoring dan evaluasi seluruh program kerja perangkat daerah;
- m. memfasilitasi pelaksanaan Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) pada proses Pengadaan Barang dan Jasa;



- n. melaksanakan implementasi akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi perangkat daerah;
- o. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan subbagian perencanaan dan keuangan;
- p. melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan subbagian perencanaan dan keuangan; dan
- q. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melakukan pengelolaan administrasi umum, administrasi kepegawaian, pengembangan SDM, rumah tangga perlengkapan, dan evaluasi kinerja Aparatur Sipil Negara. Uraian tugas adalah sebagai berikut:

- a. merencanakan kegiatan Sub bagian umum dan kepegawaian;
- b. membagi tugas kepada bawahan;
- c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan sub bagian umum dan kepegawaian;
- d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan sub bagian umum dan kepegawaian;



- e. melaksanakan pengelolaan urusan surat menyurat, kearsipan serta urusan umum lainnya, hukum dan kehumasan;
- f. melaksanakan pengadaan, penyaluran, penyimpanan serta pemeliharaan peralatan dan perlengkapan;
- g. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian dan pengembangan pegawai;
- h. menyiapkan bahan penyusunan analisis kepegawaian;
- i. melaksanakan inventarisasi dan pengelolaan asset/kekayaan milik daerah di lingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman mulai dari rencana kebutuhan, pengadaan, penomoran inventaris, penyimpanan, pendistribusian, penggunaan, perawatan serta inventaris ruangan;
- j. menyiapkan bahan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dan Berita Acara Serah Terima (BAST) atas asset atau persediaan barang yang akan dihibahkan;
- k. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan sub bagian umum dan kepegawaian;
- l. melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan sub bagian umum dan kepegawaian;
- m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.



2. Bidang Perumahan

Bidang Perumahan mempunyai tugas dan fungsi memimpin dan melaksanakan tugas penyiapan bahan, penyusunan kebijakan, koordinasi, pemantauan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan terkait Pendataan, perencanaan dan pemantauan perumahan, penyediaan dan pembiayaan rumah umum, rumah komersil dan rumah susun, penyediaan dan peningkatan rumah swadaya dan rumah khusus. Untuk melaksanakan tugas dan fungsi, Bidang Perumahan mempunyai rincian tugas:

- a. menyusun rencana operasional di lingkungan bidang Perumahan;
- b. mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan bidang Perumahan;
- c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan bidang Perumahan;
- d. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan bidang Perumahan;
- e. menyusun bahan dan melaksanakan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait Pendataan, Perencanaan dan Pemantauan Perumahan;
- f. menyusun bahan dan melaksanakan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait Penyediaan dan Pembiayaan Rumah Umum, Rumah Komersil dan Rumah Susun;
- g. menyusun bahan dan melaksanakan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait Seksi Penyediaan dan Peningkatan Rumah Swadaya dan Rumah Khusus;



- h. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan bidang Perumahan;
- i. menyusun laporan pelaksanaan tugas di bidang Perumahan;
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

3. Bidang Kawasan Permukiman

Bidang Kawasan Permukiman mempunyai tugas dan fungsi memimpin dan melaksanakan tugas penyiapan bahan, penyusunan kebijakan, koordinasi, pemantauan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan terkait pendataan, perencanaan dan pemantauan kawasan permukiman peningkatan kualitas perumahan dan Kawasan permukiman permukiman kumuh, penataan kawasan permukiman khusus, kawasan permukiman perbatasan dan pulau terluar. Untuk melaksanakan tugas dan fungsi, Bidang Kawasan Permukiman mempunyai rincian tugas:

- a. menyusun rencana operasional di lingkungan bidang Kawasan Permukiman;
- b. mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan bidang Kawasan Permukiman;
- c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan bidang Kawasan Permukiman;
- d. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan bidang Kawasan Permukiman;
- e. menyusun bahan dan melaksanakan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait Pendataan, Perencanaan dan Pemantauan Kawasan Permukiman;



- f. menyusun bahan dan melaksanakan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait Peningkatan Kualitas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh;
- g. menyusun bahan dan melaksanakan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait Penataan Kawasan Permukiman Khusus, Kawasan Permukiman Perbatasan dan Pulau Terluar;
- h. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan bidang Kawasan Permukiman;
- i. menyusun laporan pelaksanaan tugas di bidang Kawasan Permukiman;
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

4. Bidang Prasarana Sarana dan Utilitas Umum (PSU)

Bidang Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) mempunyai tugas dan fungsi memimpin dan melaksanakan tugas penyiapan bahan, penyusunan kebijakan, koordinasi, pemantauan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan terkait pendataan, perencanaan dan pemantauan PSU, penyediaan PSU perumahan dan kawasan permukiman perkotaan, penyediaan PSU perumahan dan kawasan permukiman perdesaan. Untuk melaksanakan tugas dan fungsi, Bidang Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) mempunyai rincian tugas:

- a. menyusun rencana operasional di lingkungan bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU);
- b. mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU);



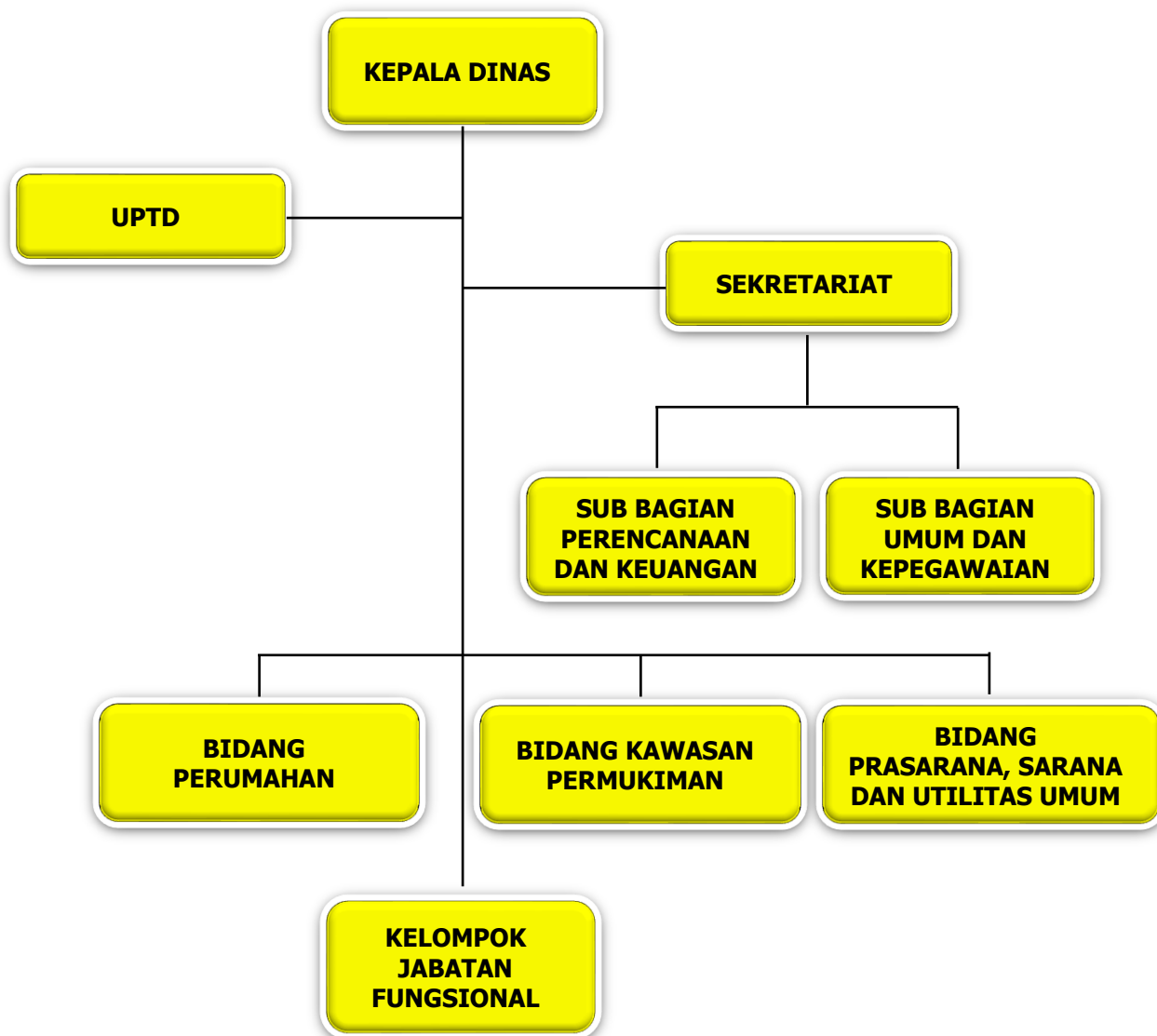
- c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU);
- d. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU);
- e. menyusun bahan dan melaksanakan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait Pendataan, Perencanaan dan Pemantauan PSU;
- f. menyusun bahan dan melaksanakan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait Penyediaan PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman Perkotaan;
- g. menyusun bahan dan melaksanakan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait Penyediaan PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman Perdesaan;
- h. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU);
- i. menyusun laporan pelaksanaan tugas di bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU);
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

5. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional, mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan tugas sesuai dengan keahlian yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Gambar 2.1
Struktur Organisasi
Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
Provinsi Kepulauan Riau



Sumber Data :

Lampiran X: Peraturan Gubernur Kepulauan Riau
Nomor : 12 Tahun 2023
Tanggal : 12 Juni 2023

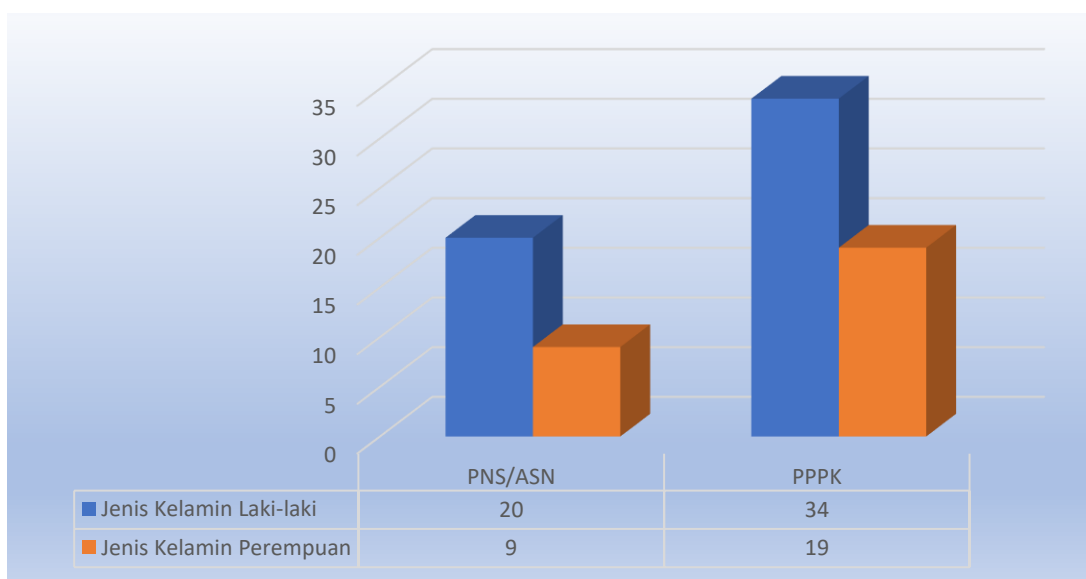


b. Sumber Daya Perangkat Daerah

Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) dilingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau berjumlah 82 (delapan puluh dua) orang yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) berjumlah 29 (dua puluh sembilan) orang, dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) berjumlah 53 (lima puluh tiga) orang, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.1.
Aparatur Sipil Negara (ASN) Berdasarkan Gender

No.	Uraian	Jenis Kelamin		Total
		Laki-laki	Perempuan	
1	2	3	4	5
1	PNS	20	9	29
2	PPPK	34	19	53
Jumlah		54	28	82

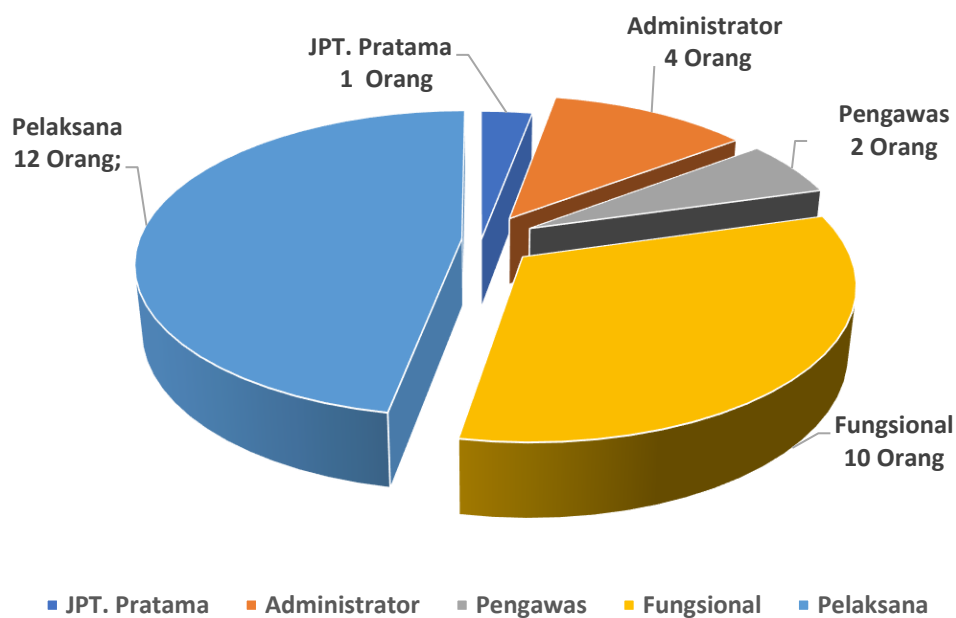




Tabel 2.2.
Pegawai Negeri Sipil (PNS) Berdasarkan Jabatan

No.	Uraian / Jabatan	Jenis Kelamin		Jumlah Orang
		Laki-laki	Perempuan	
1	2	3	4	3
1	JPT. Pratama / Eselon II	1	-	1
2	Administrator / Eselon III	3	1	4
3	Pengawas / Eselon IV	2	-	2
4	Jabatan Fungsional Tertentu (JFT)	7	3	10
5	Pelaksana	7	5	12
Jumlah		20	9	29

PNS BERDASARKAN JABATAN





Sarana dan Prasarana yang digunakan oleh Dinas dalam melaksanakan tugas, pokok dan fungsinya adalah sangat baik, setiap ASN dan Non ASN yang bekerja dilengkapi dengan peralatan yang mendukung kinerja baik secara pribadi maupun aset perangkat daerah. Peralatan yang dimaksud adalah sarana seperti komputer beserta kelengkapannya dan juga software-software pendukungnya. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau belum memiliki unit pelaksana teknis daerah.

Aset Tetap adalah aset berwujud yang: (a) dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa, untuk direntalkan kepada pihak lain, atau untuk tujuan administratif, dan (b) diperkirakan untuk digunakan selama lebih dari satu periode. Pengakuan aset tetap diakui sebagai aset jika dan hanya jika: (a) kemungkinan besar entitas akan memperoleh manfaat ekonomik masa depan dari aset tersebut dan (b) biaya perolehannya dapat diukur secara andal. Pengukuran saat pengakuan aset tetap memenuhi kualifikasi pengakuan sebagai aset diukur pada biaya perolehan yang meliputi (a) harga perolehannya (b) biaya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk membawa aset ke lokasi (c) estimasi awal biaya pembongkaran dan pemindahan aset tetap dan restorasi lokasi aset tetap. Aset Tetap yang dimiliki Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau saat ini antara lain:

1. Bangunan Gedung

Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau memiliki 1 (satu) bangunan gedung kator, dengan kondisi sangat baik yang berada di Pulau Dompak



beralamat di Jalan Muhammad Sani, Kelurahan Tanjung Ayun Sakti Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang.

2. Peralatan Dan Mesin

Peralatan Dan Mesin yang dimiliki Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau, yang mendukung operasional organisasi dalam mencapai tujuan organisasi, sebagaimana yang terdapat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.3.
Aset Tetap Peralatan Dan Mesin

No.	Uraian	Tahun Perolehan	Jumlah (Unit)	Kondisi	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1	Mobil Toyota Fortuner 2.7 V	2014	1	Baik	Kadis
2	Mobil Toyota Inova	2004	1	Baik	Sekretaris
3	Sepeda Motor Honda-Revo	2011	1	?	
4	Sepeda Motor Yamaha-Byson	2012	1	Baik	
5	Sepeda Motor Honda-Vario CBS Idling Stop	2013	2	Baik	
6	Sepeda Motor Honda-Scoopy	2018	1	Baik	
7	Sepeda Motor Honda Vario CBS 155	2022	4	Baik	
8	Elektrik Panel Cintrol	2018	2	Baik	
9	Global Positioning System	2014	1	Baik	
10	Mesin Ketik Elektronik/Selektrik	2014	1	Baik	
11	Lemari Kayu	2019	15	Baik	
12	Rak Besi	2019	22	Baik	
13	Rak Kayu	2018	1	Baik	
14	Filing Cabinet Besi – UNICO	2018	3	Baik	
15	Brankas – ICHIBAN	2018	1	Baik	
16	Lemari Kaca	2018	2	Baik	
17	CCTV - Camera Control Television System	2018	1	Baik	
18	Alat Penghancur Kertas- SECURE MAXI 25MCM	2023	1	Baik	

Rencana Strategis (Renstra)
Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2025 - 2029



No.	Uraian	Tahun Perolehan	Jumlah (Unit)	Kondisi	Keterangan
1	2	3	4	5	6
19	Alat Penghancur Kertas-MAXI 25SCM PAPER SHREDDER	2024	5	Baik	
20	Alat Penghancur Kertas	2017	3	Rusak	
21	Alat Penghancur Kertas-SECURE MAXI PENGHANCUR KERTAS-25 SCM	2022	1	Baik	
22	Mesin Absensi - BIOV- F300+	2017	1	Baik	
23	Mesin Absensi - BIOV-BS500	2017	2	Baik	
24	White Board Electronic	2017	1	Baik	
25	Lampu-lampu Kristal	2018	1	Baik	
26	Papan Pengumuman	2018	1	Baik	
27	Laptop-ACER Tipe: TRAVELMATE P214 /INTEL CORE I7 1165G7/16GB/512GB	2024	2	Baik	
28	Meja Kerja Kayu	2018	5	Baik	
29	Meja Kerja Kayu	2019	9	Baik	
30	Kursi Rapat	2015	18	Baik	
31	Kursi Rapat	2017	10	Baik	
32	Kursi Tamu	2017	6	Baik	
33	Partisi	2017	4	Baik	
34	Partisi	2018	3	Baik	
35	Sofa	2017	2	Baik	
36	Sofa	2018	5	Baik	
37	Vacuum Cleaner Krisbow-60 L	2017	1	Baik	
38	Mesin Pemotong Rumput - HONDA UMR435T	2022	2	Baik	
39	Lemari Es - Kulkas-	2013	1	Baik	
40	A.C. Window Mitsubishi-2 PK	2017	6	Baik	
41	A.C. Window Mitsubishi-1 PK	2017	13	Baik	
42	A.C. Split GREE 1 PK	2023	4	Baik	
43	A.C. Split MITSUBIHI - SRK09CCR	2018	8	Baik	
44	A.C. Split SAMSUNG-1 PK LOW WATT	2022	13	Baik	
45	Televisi XIAOMI Tipe: BEZZELLESS 4K SMART ANDROID TV	2024	2	Baik	
46	Televisi	2014	1	?	
47	Televisi - SAMSUNG	2018	3	Baik	

Rencana Strategis (Renstra)
Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2025 - 2029



No.	Uraian	Tahun Perolehan	Jumlah (Unit)	Kondisi	Keterangan
1	2	3	4	5	6
48	Televisi - SAMSUNG-85Au8000 SMART TV 4K UHD	2022	2	Baik	
49	Loudspeaker	2023	1	Baik	
50	Sound System	2018	1	Baik	
51	Mic Conference - Bosch CC8 800	2013	1	?	
52	Camera Video-MAVIC PRO Dan Sony	2018	2	Baik	
53	Camera Video-Logitech-Meetup Video Conferencing All In One	2021	1	Baik	
54	Meja Kerja Pejabat Eselon II	2022	1	Baik	
55	Meja Kerja Pejabat Eselon III s.d. IV	2017	14	Baik	
56	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	2017	20	Baik	
57	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	2018	15	Baik	
58	Meja Kerja Pejabat Lain-Lain	2022	20	Baik	
59	Meja Rapat Pejabat Eselon II	2017	1	Baik	
60	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	2022	1	Baik	
61	Kursi Kerja Pejabat Eselon III Dan IV	2017	3	Baik	
62	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	2017	20	Baik	
63	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	2018	16	Baik	
64	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	2019	9	Baik	
65	Kursi Kerja - PICASSO-IV GAR SK	2022	20	Baik	
66	Kursi Rapat Pejabat	2017	8	Baik	
67	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat	2018	12	Baik	
68	Lemari Dan Arsip Pejabat	2019	20	Baik	
69	Camera Electronic	2018	1	Baik	
70	Layar Film/Projector Infocus-IN8696HD	2015	1	Baik	
71	Alat Komunikasi Telephone Lain-Lain IP PHONE-GRANDSTREAM GXP 1610	2018	5	Baik	
72	Uninterrupted Power Supply (UPS) ICA Tipe: CP1400 / 1400VA	2024	5	Baik	
73	Target Drone (Simulasi Pesawat Sasaran Tembak Udara)	2018	1	Baik	
74	P.C Unit – Dell	2012	1	Baik	
75	P.C Unit - Lenovo - IdeaCenter AIO 310-20IAP	2017	6	Baik	
76	P.C Unit – HP	2018	10	Baik	



No.	Uraian	Tahun Perolehan	Jumlah (Unit)	Kondisi	Keterangan
1	2	3	4	5	6
77	P.C Unit - ASUS-AIO A6521EAK	2022	4	Baik	
78	Lap Top ASUS A1402ZA/INTEL CORE i5 1235U/8GB/512GB	2023	1	Baik	
79	Lap Top SONY VAIO	2014	1	Baik	
80	Lap Top LENOVO	2019	1	Baik	
81	Lap Top - LENOVO IDEAPAD-1135G7	2022	6	Baik	
82	Lap Top - ASUS VIVOBOOK-A416JAO	2022	12	Baik	
83	Note Book	2014	4	Baik	
84	Note Book - HP-14-A064	2017	15	Baik	
85	Tablet PC SAMSUNG Tipe: TAB S9 FE 5G	2024	5	Baik	
86	Hard Disk	2014	1	Baik	
87	Printer EPSON Tipe: EPSON WF100	2024	3	Baik	
88	Printer EPSON ECO TANK L1250 WIFI INK TANK PRINTER	2023	2	Baik	
89	Printer EPSON L 3210	2023	2	Baik	
90	Printer BROTHER DCP-T426W	2024	10	Baik	
91	Printer Lainnya	2013-2018	22	?	
92	Printer EPSON-L3210	2022	15	Baik	
93	Scanner EPSON Tipe: DS-C330	2024	2	Baik	
94	Hard Disk Eksternal	2018	16	?	
95	Peralatan Jaringan Lainnya	2018	11	Baik	
96	USB-A HUB DLINK-DGS 1024D	2018	2	Baik	
97	Aset Tetap Gedung Dan Bangunan Kantor	2017	1	Baik	

c. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan sasaran/target Renstra Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau yang di ukur sampai dengan Tahun 2024, dituangkan dalam tabel dibawah



Tabel 2.4.
Capaian Kinerja Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau
Berdasarkan Tujuan pada Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021 - 2026

No	Tujuan	Indikator	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun					Realisasi Capaian Renstra PD pada Tahun					Persentase (%) Rasio Capaian Renstra PD s.d pada Tahun					Ket.	
				2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
1.	Peningkatan pemenuhan kebutuhan perumahan dan infrastruktur dengan pemanfaatan dan pengelolaan yang partisipatif untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat permukiman yang layak dan aman	Pengurangan Luas Kawasan Kumuh (ha)	Ha	145,27	123,71	334,21	329,21	324,21	147.24	135,07	178,65	n/a	n/a	92,20	12,17	146,55	n/a	n/a		
		Persentase Warga Negara Yang Terkena Relokasi Akibat Program Pemerintah Daerah Provinsi Dan Korban Bencana Yang Memperoleh Fasilitas Penyediaan Rumah Yang Layak Huni	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	n/a	n/a	100	100	100	n/a	n/a	
		Persentase Penyediaan Prasarana Sarana Utilitas Umum	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	n/a	n/a	100	100	100	n/a	n/a	-
2.	Tata Kelola Pemerintahan Daerah Yang Transparan Dan Akuntabel	Predikat Akuntabel Kinerja Intansi Pemerintah (AKIP) Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Predikat	n/a	n/a	80	83	85	n/a	n/a	81	n/a	n/a	n/a	n/a	101	n/a	n/a		

Rencana Strategis (Renstra)
Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2025 - 2029



Tabel 2.5.
Capaian Indikator Kinerja Utama
Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau
Berdasarkan Saasaran pada Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021 - 2026

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun					Realisasi Capaian Renstra PD pada Tahun					Persentase (%) Rasio Capaian Renstra PD s.d pada Tahun					Keterangan
				2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1.	Meningkatnya Penyediaan Rumah Layak Huni Akibat Bencana Provinsi dan Relokasi Program Pemerintah	Persentase Warga Negara yang Terkena Relokasi Akibat Program Pemerintah Daerah Provinsi yang Memperoleh Fasilitas Penyediaan Rumah yang Layak Huni	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
		Persentase Warga Negara Korban Bencana Yang Memperoleh Rumah Layak Huni	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
2	Meningkatkan Akses Terhadap Infrastruktur dan Pelayanan Dasar di Permukiman Kumuh	Persentase RTLH Yang Dibenahi	%	10	15	0	0	0	0	15,23	0	0	0	0	101.53	0	0	0	Indikator Murni
		Jumlah Rumah Layak Huni Yang Di Bangun	Unit Rumah	0	100	50	50	50	0	100	21	n/a	n/a	0	100	42	n/a	n/a	Indikator Perubahan
		Pengurangan Luas Kawasan Kumuh (Ha)	Ha	145,27	123,73	334,21	329,21	324,21	147.24	135,07	178,65	n/a	n/a	92,20	12,17	146,55	n/a	n/a	
	Meningkatnya Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum	Penyediaan Prasarana Sarana Utilitas Umum Untuk Melayani Perumahan Penduduk (Jumlah Penduduk Terlayani)	Unit	10000	12000	0	0	0	10000	12000	0	0	0	100	100	0	0	0	Indikator Murni
		Jumlah Lokasi Penyediaan Prasarana Sarana	Jumlah Lokasi	0	0	7	7	7	0	0	7	n/a	n/a	0	0	100	n/a	n/a	

Rencana Strategis (Renstra)
Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2025 - 2029



No	Sasaran	Indikator	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun					Realisasi Capaian Renstra PD pada Tahun					Persentase (%) Rasio Capaian Renstra PD s.d pada Tahun					Keterangan
				2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Utilitas Umum (PSU)																	
	Tata Kelola Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Yang Transparan Dan Akuntabel	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Nilai	n/a	n/a	80	83	85	n/a	n/a	80	n/a	n/a	n/a	n/a	101	n/a	n/a	



Tabel 2.6.
Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK)
Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau
Berdasarkan Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Tahun 2021 – 2026

No.	Indikator Kinerja Kunci (IKK) Outcome	Satuan	Capaian Kinerja Tahun					
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Persentase Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni	Persentase (%)	100	100	100	68,03	100	n/a
2.	Persentase Warga Negara yang Terkena Relokasi Akibat Program Pemerintah Daerah Provinsi yang Memperoleh Fasilitas Penyediaan Rumah Yang Layak Huni	Persentase (%)	100	100	100	100	100	n/a
3.	Persentase Luas Kawasan Kumuh 10-15 Ha yang ditangani	Persentase (%)	51,45	58,69	13,66	20,08	63,12	n/a
4.	Persentase Satuan Perumahan yang Sudah Dilengkapi PSU	Persentase (%)	84,48	100	100	52,66	52,66	n/a



Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau, dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029, menselaraskan program-program yang terdapat pada RPJMN Tahun 2025-2029 dan/atau PRJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029, berupa antara lain :

1. Pembangunan 3 Juta Rumah, pada program:
 - a. Program Pengembangan Perumahan;
 - i. Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi;
 - 1) Sub Kegiatan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana;
 - 2) Sub Kegiatan Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana;
 - 3) Sub Kegiatan Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Provinsi;
 - 4) Sub Kegiatan Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Provinsi.
 - b. Program Kawasan Permukiman;
 - i. Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha;
 - 1) Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha;
 - 2) Sub Kegiatan Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha;



2. Penyesaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE), pada Program:
 - a. Program Kawasan Permukiman;
 - i. Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha;
 - 1) Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha;
 - 2) Sub Kegiatan Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha;
3. Percepatan Penurunan Stunting, pada Program:
 - a. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU);
 - i. Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU;
 - 1) Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman;
4. Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Program:
 - a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi;
 - i. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
 - 1) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan;
 - 2) Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN;



- ii. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
 - 1) Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya;
 - 2) Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi.
- b. Program Kawasan Permukiman;
 - i. Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha;
 - 1) Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha;
 - 2) Sub Kegiatan Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha;
 - c. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU);
 - i. Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU;
 - 1) Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman;
- d. Kelompok Sasaran Layanan**

Kelompok sasaran layanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau, terdiri dari :



1. Masyarakat yang menjadi korban bencana dan/atau masyarakat terkena relokasi program Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau;
2. Masyarakat yang berada di kawasan permukiman kumuh luasan 10 Ha s.d. dibawah 15 Ha, yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau;
3. Kepala Keluarga yang menempati Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang berpenghasilan rendah;
4. Masyarakat yang berpenghasilan rendah yang belum memiliki rumah;
5. Masyarakat yang berada di perumahan dan kawasan permukiman yang memerlukan peyediaan prasarana sarana dan utilitas umum (PSU).

e. Mitra Perangkat Daerah

Mitra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau, antara lain:

1. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman;
2. Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau;
3. Kantor Wilayah Agraria Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Provinsi Kepulauan Riau;
4. Badan Perencanaan, Pembangunan dan Penelitian Provinsi Kepulauan Riau;
5. Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau;
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Riau;
7. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau;
8. Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau;



9. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau;
10. Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau;
11. Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau;
12. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten/Kota;
13. Asosiasi Pengembang Perumahan;
14. Perusahaan/Badan dan/atau Organisasi yang melaksanakan Corporate Social Responsibility (CSR) terkait dengan perumahan dan kawasan permukiman.

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

a. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam perumusan kebijakan publik, hal terpenting yang perlu dilakukan adalah mengidentifikasi permasalahan kebijakan (*policy problem*). Sebagai salah satu tahapan proses perumusan isu-isu strategis daerah, dinamika lingkungan eksternal yang kemungkinan besar terjadi di masa datang, baik yang memberi peluang atau sebaliknya berdampak ancaman bagi masyarakat, perlu dikenali permasalahan utama yang dihadapi oleh daerah, berikut pendalaman akar tiap-tiap masalahnya melalui suatu analisis permasalahan pembangunan. Adapun, permasalahan pembangunan dimaknai sebagai penyebab kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan. Potensi permasalahan pembangunan daerah, disadari timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang-peluang yang tidak dimanfaatkan hingga ancaman yang tidak diantisipasi.



Berlandaskan pada Peraturan Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau, mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang Sekretariat, Perumahan, Kawasan Permukiman, Prasarana Sarana dan Utilitas Umum (PSU);
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang Sekretariat, Perumahan, Kawasan Permukiman, Prasarana Sarana dan Utilitas Umum (PSU);
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Sekretariat, Perumahan, Kawasan Permukiman, Prasarana Sarana dan Utilitas Umum (PSU);
- d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang Sekretariat, Perumahan, Kawasan Permukiman, Prasarana Sarana dan Utilitas Umum (PSU);
- e. penerapan sistem pengendalian intern pada perangkat daerah untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kinerja yang terintegrasi;
- f. pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada unit kerjanya;
- g. penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah secara periodik kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah; dan



- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Rumusan permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah, dapat dipetakan melalui tabel berikut:

Tabel 2.7.
Pemetaan Permasalahan Dalam Penentuan Prioritas Dan Sasaran Pembangunan Daerah pada Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4
1.	Masih Rendahnya Capaian Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan di Provinsi Kepulauan Riau	Masih banyaknya rumah tidak layak huni dan masyarakat yang belum memiliki rumah di Provinsi Kepulauan Riau	Belum terpenuhinya rumah masyarakat sesuai standar teknis yang dipersyaratkan
			Masih rendahnya rumah masyarakat yang belum mendapatkan akses layanan dasar
			Masih banyaknya masyarakat yang berpenghasilan rendah
			Belum terpenuhinya penyediaan rumah bagi korban bencana dan/atau relokasi program pemerintah provinsi
		Masih terdapat kawasan permukiman di Provinsi Kepulauan Riau dengan kualitas rendah	Masih terdapat kawasan permukiman yang belum terlayani PSU yang memadai
			Pertumbuhan kawasan permukiman yang tidak terkendali
			Masih terdapat kawasan permukiman kumuh di Provinsi Kepulauan Riau yang belum ditangani



Permasalahan pokok yang dihadapi Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau dalam pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi yang merupakan pelayanan dasar, yang mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah periode sebelumnya. Kinerja pelayanan dasar Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau dalam pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Perumahan Rakyat pada Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029, dilaksanakan melalui Program Pengembangan Perumahan melalui 4 (empat) kegiatan yang mendukung, yaitu :

1. Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi;
2. Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi;
3. Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi, dan
4. Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi.

Tabel 2.8.
Permasalahan dan Upaya Pemecahan Masalah Pelaksanaan Penyelenggaraan
SPM Urusan Perumahan Rakyat

No.	Permasalahan	Upaya Pemecahan Masalah
1.	Penetapan status bencana provinsi	Penetapan status bencana di Provinsi Kepulauan Riau dapat dilakukan oleh Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Hal ini terjadi apabila Gubernur dan Wakil Gubernur menjadi korban bencana dan tidak dapat menetapkan status keadaan darurat. Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana provinsi tetap dilaksanakan karena penanganan rumah



No.	Permasalahan	Upaya Pemecahan Masalah
		pasca bencana sudah menjadi tupoksi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau. Saat ini belum terdapat bencana daerah yang ditetapkan oleh Kepala Daerah,
2	Update data dasar untuk pelaksanaan SPM yang diperoleh dari Kabupaten/ Kota masih belum maksimal	• Koordinasi dengan Kabupaten/Kota pada OPD terkait (BPBD dan Dinas yang menangani) untuk updating dan sinkronisasi data secara berkala); • Melakukan inventarisasi dan pengumpulan data-data warga negara yang berdomisili dilokasi dan/atau daerah-daerah rawan bencana
3	Dalam tahun anggaran berjalan tidak terdapat bencana daerah dan/atau relokasi program pemerintah	Laporan penyelenggaraan SPM Perumahan Rakyat tetap diakui terlaksana 100% dengan melaksanakan prgoram kegiatan yang mendukung pelayanan dasar

Permasalahan lainnya yang dihadapi Dinas Perumahan dan kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau dalam mendukung penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau setiap tahun, pada urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi, dalam pemenuhan indikator kinerja kunci (IKK-*Outcome*) dan/atau (IKK-*Output*), yaitu Persentase satuan perumahan yang sudah dilengkapi PSU, yang meliputi daftar pengembang, daftar perumahan, jumlah satuan perumahan terfasilitasi PSU yang sudah diserahkan ke Pemda, serta berita acara serah terima PSU dari pengembang. Untuk memenuhi kebutuhan dan kelengkapan data pendukung dalam penyusunan laporan penyelenggara pemerintah daerah setiap tahunnya pada Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029, dilaksanakan melalui Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU), pada Kegiatan Urusan



Penyelenggaraan PSU Permukiman, di Sub Kegiatan Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dari Pengembang.

Beberapa permasalahan lainnya dan upaya pemecahan masalah dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman, yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi antara lain :

1. Sekretariat

- a. Masih berkurangnya SDM dan/atau Aparatur Sipil Negeri (ASN) dalam memenuhi jabatan yang ada, untuk melaksanakan tugas dan menyelenggarakan fungsi sekretariat dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan administrasi, dan fungsi lainnya yang diberikan oleh Gubernur;
- b. Sarana dan prasarana yang belum optimal dalam memenuhi kebutuhan bekerja;
- c. Belum optimalnya anggaran guna mendukung urusan wajib dan mengikat perangkat daerah.

2. Bidang Perumahan

- a. Masih berkurangnya SDM dan/atau Aparatur Sipil Negeri (ASN) dalam memenuhi jabatan yang ada, untuk melaksanakan tugas dan menyelenggarakan fungsi bidang perumahan dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terkait pendataan, perencanaan dan pemantauan perumahan, penyediaan dan pembiayaan rumah umum, rumah komersial dan rumah susun, penyediaan dan peningkatan rumah swadaya dan rumah khusus serta pelaksanaan administrasi, dan fungsi lainnya yang diberikan oleh Gubernur;



- b. Belum maksimalnya Pemerintah dalam mendukung penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana provinsi, serta fasilitasi penyediaan rumah bagi Masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah provinsi, yang merupakan pelayanan dasar dalam pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM) urusan bidang perumahan rakyat;
 - c. Belum tersedianya dokumen yang akurat terkait tugas dan fungsi bidang perumahan dalam menjalankan pelayanan dasar urusan bidang perumahan rakyat, guna mempermudah pihak-pihak lain dan/atau stakeholder dalam mengakses.
3. Bidang Kawasan Permukiman
- a. Masih berkurangnya SDM dan/atau Aparatur Sipil Negeri (ASN) dalam memenuhi jabatan yang ada, untuk melaksanakan tugas dan menyelenggarakan fungsi bidang kawasan permukiman dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan administrasi, dan fungsi lainnya yang diberikan oleh Gubernur;
 - b. Belum maksimalnya pemerintah daerah dalam mendukung Penataan dan/atau Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (lima belas) Ha, yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau;
 - c. Masih terdapat rumah dengan kategori rumah tidak layak huni, baik di perkotaan dan/atau di pesisir pantai yang memerlukan penanganan, utamanya di kantong-kantong kemiskinan;
 - d. Belum optimalnya sinergitas antar sektor untuk penanganan pengurangan luas kawasan kumuh.



4. Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)
 - a. Masih berkurangnya SDM dan/atau Aparatur Sipil Negeri (ASN) dalam memenuhi jabatan yang ada, untuk melaksanakan tugas dan menyelenggarakan fungsi bidang prasarana, sarana dan utilitas umum dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan administrasi, dan fungsi lainnya yang diberikan oleh Gubernur;
 - b. Belum tersedianya dokumen yang akurat terkait PSU yang telah dibangun oleh pengembang dan belum diserahkan ke Pemerintah Kabupaten/Kota, sehingga sulit bagi Pemerintah Provinsi memperbaiki/revitalisasi PSU sebagai fungsi penunjang permukiman.

b. Isu Strategis

Isu strategis dimaknai sebagai hal-hal yang bersifat penting, yang memiliki daya ungkit, serta berpengaruh besar bagi pembangunan provinsi kepulauan riau kedepan yang dipangku oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau untuk 5 (lima) tahun kedepan. Perumusan isu strategis tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan permasalahan pembangunan daerah sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bersumber dari isu nasional dan isu regional.

Isu-isu nasional yang berkembang pada RPJMN 2025-2029 pada urusan bidang perumahan dan kawasan permukiman, yang dipangku Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau pada Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029, antara lain (a) penurunan kemiskinan, (b) peningkatan kualitas infrastruktur, (c) peningkatan kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan, anak dan penyandang disabilitas.



Masih rendahnya akses masyarakat terhadap hunian yang layak, terjangkau dan berkelanjutan, terutama bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah (MBR) khususnya di Provinsi Kepulauan Riau. Sehingga masih terdapat rumah yang tidak layak huni, dan masyarakat yang belum memiliki rumah sesuai standar teknis yang dipersyaratkan, rumah masyarakat yang belum mendapatkan akses layanan dasar, serta belum terpenuhinya penyediaan rumah bagi korban bencana dan/atau relokasi program pemerintah provinsi.

Belum optimalnya penanganan rumah korban bencana daerah, antara lain korban bencana yang terjadi di Desa Pangkalan Kecamatan Serasan Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau. Berdasarkan data dari 147 unit rumah korban bencana, pada tahun 2023 baru ditangani 100 unit rumah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Pada tahun anggaran 2025, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau akan membangun sebanyak 3 (tiga) unit rumah, sehingga masih diperlukan 44 (empat puluh empat) unit rumah untuk korban bencana.

Sebaran data rumah tidak layak huni (RTLH) yang terdapat pada Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan data yang bersumber dari Bada Pusat Statistik (BPS) melalui Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebanyak 128.255 (seratus dua puluh delapan ribu dua ratus lima puluh lima) unit rumah, dan sebaran dapat disajikan pada tabel 2.9. sebagai berikut:

Terdapatnya kawasan permukiman yang belum memiliki dan/atau terlayani infrastruktur prasarana sarana utilitas (PSU) umum yang memadai, sehingga mengakibatkan pertumbuhan kawasan permukiman yang tidak terkendali, menjadi kawasan permukiman yang kumuh yang belum ditangani.

Rencana Strategis (Renstra)
Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2025 - 2029



Tabel 2.9.

**Data Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Provinsi Kepulauan Riau
Pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029**

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Rumah	Desil 1	Desil 2	Desil 3	Desil 4	Desil 5	Desil 6	Desil 7	Desil 8	Desil 9	Desil 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Kabupaten Bintan	14.044	1.171	1.136	1.318	1.332	1.778	1.434	1.655	2.244	1.250	726
2.	Kabupaten Karimun	19.527	1.740	1.893	2.434	1.726	2.197	1.825	1.298	2.220	2.474	1.720
3.	Kabupaten Kepulauan Anambas	8.836	600	795	852	824	794	797	819	958	1.180	1.217
4.	Kabupaten Lingga	13.777	1.640	2.611	2.389	1.813	1.601	1.214	892	917	555	145
5.	Kabupaten Natuna	9.633	671	927	1.045	973	968	981	881	956	1.224	1.007
6.	Kota Batam	50.725	5.446	6.531	4.810	3.869	4.530	3.408	3.491	3.994	6.124	8.522
7.	Kota Tanjungpinang	11.713	1.063	1.468	1.302	929	1.223	701	723	2.156	1.352	796
Jumlah		128.255	12.331	15.361	14.150	11.466	13.091	10.360	9.759	13.445	14.159	14.133

Sumber data diolah dari Badan Pusat Statistik (BPS) melalui Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN)

Yang menjadi Prioritas oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau sebanyak 40.977 Unit Rumah yang terdapat pada Desil 2,3 dan 4



Sebaran data rumah tidak layak huni (RTLH) yang terdapat pada Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan data yang bersumber dari Surat Keputusan Bupati/Walikota, rumah tidak layak huni (RTLH) yang berada di kawasan permukiman kumuh yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan luas 10 (sepuluh) Ha sampai dengan di bawah 15 (lima belas) Ha sebanyak 748 (tujuh ratus empat puluh delapan) unit rumah dan sebaran dapat dilihat pada tabel 2.10. sebagai berikut:

Rencana Strategis (Renstra)
Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2025 - 2029



Tabel 2.10.

**Data Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) 10 Ha s.d di Bawah 15 Ha di Provinsi Kepulauan Riau
Pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029**

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Rumah	Kecamatan	Kelurahan/Desa	Nama Kawasan	Jumlah Unit Rumah
1	2		3	4	5	6
1.	Kabupaten Bintan	30	1. Kecamatan Gunung Kijang	1. Desa Gunung Kijang	Gunung Kijang	0
			2. Kecamatan Sri Kuala Lobam	1. Kelurahan Teluk Lobam	Teluk Lobam	0
			3. Kecamatan Teluk Bintan	1. Kelurahan Tembeling Tanjung	Tembeling Tanjung	28
				2. Desa Tembeling	Desa Tembeling	2
			4. Kecamatan Teluk Sebung	1. Kelurahan Kota Baru	Kota Baru	0
2.	Kabupaten Karimun	224	1. Kecamatan Karimun	1. Kelurahan Sei Lekam Barat	Sei Lekam Barat 1	115
				2. Kelurahan Teluk Air	Teluk Air 1	7
					Teluk Air 2	6
			2. Kecamatan Meral	1. Kelurahan Baran Timur	Paye Manggis	79
			3. Kecamatan Tebing	1. Kelurahan Kapling	Sei Ayam	15
				2. Kelurahan Tebing	Tebing 1	1
					Tebing 2	1
3.	Kabupaten Lingga	71	1. Kecamatan Bakung Serumpun	1. Desa Rejai	Rejai	71
4.	Kabupaten Natuna	95	1. Kecamatan Pulau Tiga	1. Desa Tanjung Batang	Tanjung Batang	91

Rencana Strategis (Renstra)
Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2025 - 2029



No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Rumah	Kecamatan	Kelurahan/Desa	Nama Kawasan	Jumlah Unit Rumah
1	2		3	4	5	6
			2. Bunguran Batubi	1. Desa Batubi Jaya	Batubi Jaya	0
				2. Desa Gunung Putri	Gunung Putri	4
5.	Kota Batam	292	1. Kecamatan Bulang	1. Kelurahan Pulau Setokok	Pulau Setokok	197
				2. Kelurahan Pantai Gelam	Pantai Gelam	57
				3. Kelurahan Pulau Buluh	Pulau Buluh	0
				4. Kelurahan Temoyong	Temoyong	19
			2. Kecamatan Belakang Padang	1. Kelurahan Pemping	Pemping	19
6.	Kota Tanjungpinang	36	1. Kecamatan Bukit Bestari	1. Kelurahan Tanjung Unggat	Tanjung Unggat	17
			2. Kecamatan Tanjungpinang Barat	1. Kelurahan Kemboja	Kemboja	19
7.	Kabupaten Kepulauan Anambas	0				0
Jumlah		748				748

Sumber Data diolah berdasarkan SK Kawasan Kumuh Kabupaten/Kota



Sebaran data rumah tidak layak huni (RTLH) yang terdapat pada Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan data yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) melalui Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), rumah tidak layak huni (RTLH) yang berada di kawasan permukiman kumuh yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan luas 10 (sepuluh) Ha sampai dengan di bawah 15 (lima belas) Ha sebanyak 650 (enam ratus lima puluh) unit rumah dan sebaran dapat dilihat pada tabel 2.11. sebagai berikut:

Tabel 2.11.
Data Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) 10 Ha s.d di Bawah 15 Ha
Pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029

No	Kabupaten/Kota	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Jumlah Unit Rumah
1	2	3	4	5
1	Kabupaten Bintan	Kec. Teluk Sebong	Kota Baru	26
		Kec. Seri Kuala Lobam	Kel. Teluk Lobam	38
		Kec. Gunung Kijang	Desa Gunung Kijang	41
		Kec. Teluk Bintan	Kel. Tembeling Tanjung	294
			Desa Tembeling	118
2	Kabupaten Karimun	Kec. Karimun	Sei Lakam Barat 1	48
			Teluk Air 1	12
			Teluk Air 2	0
		Kec. Baran Timur	Paya Manggis	0
		Kec. Tebing	Kapling	3
			Tebing 1	20
3	Kabupaten Natuna	Kec. Pulau Tiga	Desa Tanjung Batang (Dusun 1)	9
		Kec. Bunguran Batubi	Kawasan Batubi Jaya	21
			Kawasan Gunung Putri	0



No	Kabupaten/Kota	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Jumlah Unit Rumah
1	2	3	4	5
4	Kabupaten Lingga	Kec. Bakung Serumpun	Rejai	3
5	Kota Batam	Kec. Bulang	Pantai Gelam	1
			Temoyong	0
			Pulau Setokok	1
			Pulau Buluh	3
		Kec. Belakang Padang	Pemping	0
6	Kota Tanjungpinang	Kec. Bukit Bestari	Tanjung Unggat	1
		Kec. Tanjungpinang Barat	Kemboja	11
7	Kabupaten Kepulauan Anambas	-	-	0
Jumlah				650

Sedangkan kesenjangan antara jumlah rumah yang tersedia dengan jumlah rumah yang dibutuhkan oleh masyarakat (*Backlog Perumahan*) untuk kepemilikan rumah. Rumah tangga yang belum memiliki rumah hunian di Provinsi Kepulauan Riau sejumlah 133.209 (seratus tiga puluh tiga ribu dua ratus sembilan) rumah tangga, yang dapat dilihat pada tabel 2.12. sebagai berikut:

Rencana Strategis (Renstra)
Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2025 - 2029



Tabel 2.12.

**Data Backlog Kepemilikan Rumah di Provinsi Kepulauan Riau
Pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029**

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Rumah	Desil 1	Desil 2	Desil 3	Desil 4	Desil 5	Desil 6	Desil 7	Desil 8	Desil 9	Desil 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Kabupaten Bintan	7.406	557	599	748	873	1049	1035	758	803	574	410
2.	Kabupaten Karimun	14.908	894	971	1469	1599	1505	1824	1329	2074	1679	1564
3.	Kabupaten Kepulauan Anambas	1.996	153	136	194	134	156	165	205	254	210	389
4.	Kabupaten Lingga	4.610	538	562	546	585	510	472	508	386	309	194
5.	Kabupaten Natuna	3.329	151	226	277	344	322	315	338	410	385	561
6.	Kota Batam	87.861	3.101	4.927	7.891	7.741	8.724	7.989	7.792	11.887	14.276	13.533
7.	Kota Tanjungpinang	13.099	1.455	2.176	2.090	1.659	1.383	877	685	1.081	924	769
Jumlah		133.209	6.849	9.597	13.215	12.935	13.649	12.677	11.615	16.895	18.357	17.420

Sumber data diolah dari Badan Pusat Statistik (BPS) melalui Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN)



BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan Rencana Strategi Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029

Tujuan Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran Visi dan Misi Gubernur Provinsi Kepulauan Riau yang spesifik dan terukur dalam pembangunan jangka menengah urusan bidang perumahan dan kawasan permukiman. Berdasarkan ruang lingkup serta mengacu pada RPJMD Provinsi Kepulauan Riau 2025-2029, maka tujuan pembangunan bidang perumahan dan kawasan permukiman secara garis besar bertujuan untuk mempercepat konektivitas antar pulau dan pembangunan infrastruktur kawasan terutama pada kawasan permukiman, serta pengurangan permukiman kumuh agar tercapai permukiman yang layak huni dan berkelanjutan baik di daerah pesisir maupun perkotaan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi.

Penyusunan rencana strategi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagai upaya dalam mewujudkan visi :

“Kepulauan Riau Maju, Makmur Dan Merata”

dan misi ke 2 (dua) yaitu:

“Meningkatkan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Dan Konektivitas Antar Wilayah”



Penetapan tujuan dan sasaran merupakan tahap terpenting dalam perencanaan pembangunan yang menjadi dasar penyusunan kinerja pembangunan daerah untuk lima tahun mendatang dalam rentang waktu Tahun 2025-2029. Tujuan dimaksud merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan visi dan misi yang menunjukkan hasil akhir jangka waktu tertentu dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis daerah.

Pernyataan tujuan harus menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang dan juga diselaraskan dengan amanat pembangunan. Untuk menjabarkan visi dan misi pembangunan Jangka Menengah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025-2029, Tujuan Jangka Menengah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2025-2029 yaitu **“Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Publik”** dengan Indikator Tujuan **“Indeks Kualitas Pekerjaan Umum, Perumahan Dan Permukiman”**, dengan titik sasarannya adalah Peningkatan Pemenuhan Kebutuhan Perumahan Dan Kawasan Permukiman yang layak, terjangkau, dan berkelanjutan dengan didukung Infrastruktur yang memadai.

3.2. Sasaran Rencana Strategi Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yaitu hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam suatu indikator beserta targetnya. Oleh karena itu, sasaran dinyatakan sesuai indikator secara spesifik, fokus, terukur, dan dapat dicapai dengan indikator kinerja atau



tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran yang akan diwujudkan selama 5 (lima) tahun.

Dalam rangka mencapai tujuan jangka menengah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau yaitu Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Publik, maka terdapat 1 (satu) sasaran untuk mewujudkan tujuan tersebut yaitu **“Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Perumahan Dan Kawasan Permukiman Yang Layak, Terjangkau Dan Berkelanjutan”**, dengan Indikator Sasaran **“Rumah Tangga Dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau Dan Berkelanjutan (%)”**.

Adapun Tujuan dan Sasaran pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:



Tabel 3.1.
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE CAPAIAN TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
1.04.0.00.0.00.04.0000 - Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman											
Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Publik	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Publik		Indeks Kualitas Pekerjaan Umum, Perumahan Dan Permukiman (%)	45,03	51,44	52,65	54,40	56,14	57,87	59,56	
		Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Perumahan Dan Kawasan Permukiman Yang Layak, Terjangkau Dan Berkelanjutan"	Rumah Tangga Dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau Dan Berkelanjutan (%)	57,19	59,72	60,72	63,72	66,72	69,72	72,72	



3.3. Strategi Perangkat Daerah Dalam Mencapai Tujuan Dan Sasaran Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029

Strategi perangkat daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran rencana strategis (Renstra) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029, merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang cara mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Strategi merupakan respon terhadap tujuan dan sasaran yang ditetapkan yang akan menjadi rujukan dalam perumusan program dan kegiatan. Strategi dalam Rancangan Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029 adalah strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029, yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah dalam RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029. Strategi diperlukan untuk memperjelas arah dalam pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau dalam mengemban tugas dan fungsinya, agar tetap berada pada koridor yang ditetapkan. Strategi dirumuskan berdasarkan hasil analisis terhadap gambaran pelayanan, isu strategis, serta pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029. Dengan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan ketidakberhasilan tersebut, dapat disusun strategi yang dinilai realistis dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Hasil rumusan strategi tersebut selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian arah kebijakan untuk memperjelas strategi sehingga lebih spesifik, konkrit dan operasional.



3.4. Arah Kebijakan Perangkat Daerah Dalam Mencapai Tujuan Dan Sasaran Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029

Arah kebijakan perangkat daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran rencana strategis (Renstra) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029, merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang cara mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Arah kebijakan merupakan respon terhadap tujuan dan sasaran yang ditetapkan yang akan menjadi rujukan dalam perumusan program dan kegiatan, demi mewujudkan Visi dan Misi pada RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029.



Tabel 3.2.
Tujuan, Sasaran, Strategi Dan Kebijakan Jangka Menengah
Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2025-2029

Visi : Kepulauan Riau Maju, Makmur Dan Merata				
Misi 2 : Meningkatkan Pemerataan Pembanguna Infrastruktur Dan Konektivitas Antar Wilayah				
No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1.	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Publik"	Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Perumahan Dan Kawasan Permukiman Yang Layak, Terjangkau Dan Berkelanjutan"	Peningkatan pembangunan infrastruktur dalam mempercepat konektivitas dan mengintegrasikan antar wilayah/pulau	Mewujudkan sarana dan prasarana yang berkualitas guna mendukung layanan dasar yang dapat di aksesibilitas oleh masyarakat



Tabel 3.2. diatas menggambarkan langkah-langkah strategis yang akan diambil oleh Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah. Dengan arahan kebijakan yang jelas, diharapkan seluruh program yang dijalankan akan menghasilkan dampak positif dalam memperkuat tugas, pokok dan fungsi keberadaan Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau untuk 5 (lima) tahun kedepan.



BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Perumusan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau akan berhasil dengan baik apabila terdapat komitmen penuh dari pemangku kepentingan (*stake holder*) dan keterbukaan (*transparansi*) dari seluruh aparatur melalui proses saling berkomunikasi dengan pendekatan *top-down*, *bottom-up* dan *mix-approach*.

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggaraan negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah, berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Penyusunan Renstra membutuhkan perhatian yang sangat serius dari seluruh komponen Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau agar dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan apa yang telah ditetapkan. Mempedomani dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029 adalah salah satu prasyarat yang harus dipenuhi dalam penyusunan Renstra ini, untuk mencapai harmonisasi pembangunan daerah.

Dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 pasal 5 dinyatakan bahwa RPJMD merupakan penjabaran visi, misi dan program Kepala Daerah yang berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional, yang memuat arah kebijakan keuangan



daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), lintas SKPD dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Rencana strategis (Renstra) Perangkat Daerah menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) untuk beberapa tahun kedepan, serta merupakan dasar evaluasi dan pelaporan pelaksanaan atas kinerja tahunan.

Dalam mewujudkan dan mengimplementasikan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum Dan Bidang Perumahan Rakyat, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau pada Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, setiap tahun telah mengalokasikan dan menganggarkan pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program provinsi. Sampai dengan saat ini telah terbangun 100 unit rumah korban bencana banjir dan longsor di Kecamatan Serasan dan Kecamatan Serasan Timur Kabupaten Natuna di Tahun 2023, atau baru mencapai 68,03% yang terbangun dari 147 unit rumah korban bencana. Sebanyak 47 unit rumah belum terrealisasi, sehingga kewajiban Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau untuk merealisasikan pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar. Di tahun anggaran 2025, terdapat proses pembangunan rumah korban bencana sebanyak 2 unit rumah di lokasi yang sama dan masih terdapat kekurangan 45 unit rumah yang belum terbangun, dan telah di alokasikan setiap tahun anggaran pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029.

Setelah tersusunnya Renstra ini, maka semua jajaran yang ada pada Dinas Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi



Kepulauan Riau diharapkan senantiasa melaksanakannya dengan penuh rasa tanggung jawab.

4.1. Uraian Program

Program adalah instrumen kebijakan urusan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh instansi pemerintah. Berdasarkan strategi dan kebijakan, selanjutnya ditetapkan sejumlah program prioritas yang akan dilaksanakan sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau sebagai upaya untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Program yang disusun untuk 5 (lima) tahun kedepan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029, terdiri dari 4 (empat) program, yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi;
2. Program Pengembangan Perumahan;
3. Program Kawasan Permukiman;
4. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)

Program tersebut dapat dilihat pada tabel 4.1. sebagai berikut:

Rencana Strategis (Renstra)
Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2025 - 2029



Tabel 4.1.
Uraian Program Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										BIDANG PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN					130.801.770.830,14		46.218.625.999		46.218.625.999		41.218.625.999		56.218.625.999	
1.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					17.073.625.999,82		20.530.000.000		20.529.625.999		20.530.000.000		20.530.000.000	
Meningkatnya Kualitas Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Predikat)	A	A	A	17.073.625.999,82	A	20.530.000.000	A	20.529.625.999	A	20.530.000.000	A	20.530.000.000	Bidang Sekretariat Perumahan Dan Kawasan Permukiman
	Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah (Indeks)	0	77,39	79,5		81,74		83,91		86,09		87,39		Bidang Sekretariat Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	83,72	84,98	85		85,1		85,15		85,2		85,25		Bidang Sekretariat Perumahan Dan Kawasan Permukiman
1.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN					220.000.000		3.239.000.000		3.239.000.000		3.239.000.000		4.239.000.000	
Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program pemerintah	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (%)	100	100	100	220.000.000	100	3.239.000.000	100	3.239.000.000	100	3.239.000.000	100	4.239.000.000	Bidang Perumahan Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman

Rencana Strategis (Renstra)
Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2025 - 2029



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										BIDANG PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni (%)	100	100	100		100		100		100		100		Bidang Perumahan Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
1.04.03 - PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN					12.915.459.116,07		7.700.000.000		7.750.000.000		7.700.000.000		7.750.000.000	
Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	Persentasi Luas kawasan kumuh 10 à 15 Ha yang ditangani (%)	0	1,83	5,5	12.915.459.116,07	9,17	7.700.000.000	12,83	7.750.000.000	16,5	7.700.000.000	20,16	7.750.000.000	Bidang Kawasan Permukiman Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
	Jumlah Rumah Layak Huni Yang Di Bangun (Unit)	21	100	100		100		100		100		100		Bidang Kawasan Permukiman Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
1.04.05 - PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)					100.592.685.714,25		14.749.625.999		14.700.000.000		9.749.625.999		23.699.625.999	
Meningkatnya Penyediaan PSU Permukiman	Persentase satuan perumahan yang sudah dilengkapi PSU (%)	52,66	53	53,25	100.592.685.714,25	53,5	14.749.625.999	53,75	14.700.000.000	54	9.749.625.999	54,25	23.699.625.999	Bidang Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU) Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman

Rencana Strategis (Renstra)
Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2025 - 2029



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										BIDANG PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
TOTAL KESELURUHAN					130.801.770.830,14		46.218.625.999		46.218.625.999		41.218.625.999		56.218.625.999	



4.2. Uraian Kegiatan

Kegiatan adalah instrumen kebijakan urusan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh instansi pemerintah. Berdasarkan strategi dan kebijakan, selanjutnya ditetapkan sejumlah kegiatan yang merupakan turunan program-program yang telah ditetapkan, untuk dilaksanakan sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau sebagai upaya untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Kegiatan yang disusun untuk 5 (lima) tahun kedepan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029, terdiri dari 15 (lima belas) Kegiatan, yaitu :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah;
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
9. Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi;
10. Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi;
11. Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi;



12. Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi;
13. Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha;
14. Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha; dan
15. Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman.

Rumusan terkait Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029, dapat dilihat pada Tabel 4.... sebagai berikut:



Tabel 4.2.

Uraian Kegiatan Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
1.04.0.00.0.00.04.0000 - Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman							
Meningkatnya kualitas Infrastruktur Publik	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Publik				Indeks Kualitas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Permukiman (%)		
		Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Perumahan Dan Kawasan Permukiman Yang Layak, Terjangkau Dan Berkelanjutan			Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan (%)		
			Meningkatnya Kualitas Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman		Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Predikat)	1.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	
					Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah (Indeks)	1.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	
					Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	1.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	

Rencana Strategis (Renstra)
Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2025 - 2029



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Tersedianya Laporan / Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)	1.04.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	1.04.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	1.04.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1.04.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1.04.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	1.04.01.1.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1.04.01.1.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1.04.01.1.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

Rencana Strategis (Renstra)
Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2025 - 2029



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)	1.04.01.1.01.0009 - Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	1.04.01.1.01.0010 - Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	
				Tersedianya Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	1.04.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	1.04.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1.04.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	1.04.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	1.04.01.1.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	1.04.01.1.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	

Rencana Strategis (Renstra)
Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2025 - 2029



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	1.04.01.1.02.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1.04.01.1.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
				Tersedianya Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1.04.01.1.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1.04.01.1.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1.04.01.1.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1.04.01.1.03.0002 - Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	
					Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1.04.01.1.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	
					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1.04.01.1.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	

Rencana Strategis (Renstra)
Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2025 - 2029



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Tersedianya Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	1.04.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1.04.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	1.04.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1.04.01.1.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	
					Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	1.04.01.1.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	1.04.01.1.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
				Tersedianya Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1.04.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	1.04.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	1.04.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	

Rencana Strategis (Renstra)
Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2025 - 2029



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	1.04.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1.04.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1.04.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	1.04.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1.04.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1.04.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1.04.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1.04.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1.04.01.1.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1.04.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	

Rencana Strategis (Renstra)
Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2025 - 2029



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1.04.01.1.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1.04.01.1.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1.04.01.1.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1.04.01.1.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	
					Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	1.04.01.1.06.0007 - Penyediaan Bahan/Material	
					Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	1.04.01.1.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1.04.01.1.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	1.04.01.1.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
					Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	1.04.01.1.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	

Rencana Strategis (Renstra)
Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2025 - 2029



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	1.04.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan (Unit)	1.04.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	1.04.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	1.04.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	1.04.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1.04.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1.04.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	1.04.01.1.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	1.04.01.1.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	

Rencana Strategis (Renstra)
Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2025 - 2029



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	1.04.01.1.07.0005 - Pengadaan Mebel	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	1.04.01.1.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan (Unit)	1.04.01.1.07.0007 - Pengadaan Aset Tetap Lainnya	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1.04.01.1.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1.04.01.1.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1.04.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1.04.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	1.04.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1.04.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

Rencana Strategis (Renstra)
Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2025 - 2029



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1.04.01.1.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1.04.01.1.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	1.04.01.1.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1.04.01.1.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit)	1.04.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1.04.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	1.04.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	1.04.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

Rencana Strategis (Renstra)
Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2025 - 2029



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	1.04.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1.04.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1.04.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	1.04.01.1.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	1.04.01.1.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	1.04.01.1.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit)	1.04.01.1.09.0007 - Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1.04.01.1.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	

Rencana Strategis (Renstra)
Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2025 - 2029



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1.04.01.1.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1.04.01.1.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
			Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program pemerintah		Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (%)	1.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	
					Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni (%)	1.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	
				Terlaksananya Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi yang Terverifikasi (Dokumen)	1.04.02.1.01 - Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	
					Jumlah Dokumen Data Lahan yang Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan (Dokumen)	1.04.02.1.01 - Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	

Rencana Strategis (Renstra)
Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2025 - 2029



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Provinsi (Dokumen)	1.04.02.1.01 - Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	
					Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Provinsi (Dokumen)	1.04.02.1.01 - Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	
					Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani (Dokumen)	1.04.02.1.01 - Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	
					Jumlah Dokumen Data Lahan yang Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan (Dokumen)	1.04.02.1.01.0002 - Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	
					Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani (Dokumen)	1.04.02.1.01.0003 - Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	
					Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Provinsi (Dokumen)	1.04.02.1.01.0008 - Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Provinsi	
					Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi yang Terverifikasi (Dokumen)	1.04.02.1.01.0010 - Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi	
					Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Provinsi (Dokumen)	1.04.02.1.01.0011 - Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Provinsi	

Rencana Strategis (Renstra)
Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2025 - 2029



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Terlaksananya Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Jumlah Dokumen Data Penerima Bantuan Berdasarkan Jenis Layanan (Dokumen)	1.04.02.1.02 - Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	
					Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana (Orang)	1.04.02.1.02 - Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	
					Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana (Orang)	1.04.02.1.02.0001 - Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	
					Jumlah Dokumen Data Penerima Bantuan Berdasarkan Jenis Layanan (Dokumen)	1.04.02.1.02.0006 - Koordinasi untuk Menyepakati Penerima dan Jenis Pelayanan	
				Terlaksananya Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Provinsi yang Terbangun (Unit Rumah)	1.04.02.1.03 - Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	
					Jumlah Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Provinsi yang Terbangun (Unit Rumah)	1.04.02.1.03 - Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	

Rencana Strategis (Renstra)
Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2025 - 2029



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Provinsi (Unit Rumah)	1.04.02.1.03 - Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	
					Jumlah Rumah Korban Bencana Provinsi yang Terehabilitasi (Unit Rumah)	1.04.02.1.03 - Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	
					Jumlah Rumah Tangga Korban Bencana Provinsi yang Mendapatkan Fasilitas Penyediaan Rumah (Rumah Tangga)	1.04.02.1.03 - Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	
					Jumlah Rumah Tangga yang Terdampak Relokasi Program Provinsi yang Mendapatkan Fasilitas Penyediaan Rumah (Rumah Tangga)	1.04.02.1.03 - Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	
					Jumlah Rumah Korban Bencana Provinsi yang Terehabilitasi (Unit Rumah)	1.04.02.1.03.0001 - Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	
					Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Provinsi yang Terbangun (Unit Rumah)	1.04.02.1.03.0004 - Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	
					Jumlah Rumah Tangga Korban Bencana Provinsi yang Mendapatkan Fasilitas Penyediaan Rumah (Rumah Tangga)	1.04.02.1.03.0007 - Fasilitas Penyediaan Rumah bagi Korban Bencana Provinsi	
					Jumlah Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Provinsi yang Terbangun (Unit Rumah)	1.04.02.1.03.0008 - Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Provinsi	

Rencana Strategis (Renstra)
Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2025 - 2029



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Rumah Tangga yang Terdampak Relokasi Program Provinsi yang Mendapatkan Fasilitas Penyediaan Rumah (Rumah Tangga)	1.04.02.1.03.0010 - Fasilitas Penyediaan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Provinsi	
					Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Provinsi (Unit Rumah)	1.04.02.1.03.0012 - Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Provinsi	
				Terlaksananya Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Perumahan (Laporan)	1.04.02.1.04 - Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	
					Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Perumahan (Laporan)	1.04.02.1.04.0004 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Perumahan	
			Meningkatnya kualitas kawasan permukiman		Persentasi Luas kawasan kumuh 10 s.d. 15 Ha yang ditangani (%)	1.04.03 - PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	
					Jumlah Rumah Layak Huni Yang Di Bangun (Unit)	1.04.03 - PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	
				Terlaksananya Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/ Terlegalisasi (Dokumen)	1.04.03.1.01 - Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	

Rencana Strategis (Renstra)
Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2025 - 2029



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman (Laporan)	1.04.03.1.01 - Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh (Orang)	1.04.03.1.01 - Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	
					Jumlah Rumah Tangga yang Terfasilitasi Peningkatan Kesadaran dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah (Rumah Tangga)	1.04.03.1.01 - Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	
					Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/ Terlegalisasi (Dokumen)	1.04.03.1.01.0008 - Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	
					Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman (Laporan)	1.04.03.1.01.0017 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh (Orang)	1.04.03.1.01.0018 - Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman kumuh	
					Jumlah Rumah Tangga yang Terfasilitasi Peningkatan Kesadaran dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah (Rumah Tangga)	1.04.03.1.01.0019 - Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	

Rencana Strategis (Renstra)
Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2025 - 2029



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Terlaksananya Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah Dokumen Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha (Dokumen)	1.04.03.1.02 - Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	
					Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan/Permukiman Kembali Permukiman Kumuh dan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha (Laporan)	1.04.03.1.02 - Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	
					Jumlah Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha (Unit Rumah)	1.04.03.1.02 - Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	
					Jumlah Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Diperbaiki (Unit Rumah)	1.04.03.1.02 - Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	
					Luas Permukiman Kumuh Dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Dipugar (Ha)	1.04.03.1.02 - Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	

Rencana Strategis (Renstra)
Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2025 - 2029



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan/Pemukiman Kembali Permukiman Kumuh dan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha (Laporan)	1.04.03.1.02.0002 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan/ Pemukiman Kembali Permukiman Kumuh dan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	
					Jumlah Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Diperbaiki (Unit Rumah)	1.04.03.1.02.0003 - Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	
					Jumlah Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha (Unit Rumah)	1.04.03.1.02.0011 - Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	
					Jumlah Dokumen Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha (Dokumen)	1.04.03.1.02.0012 - Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni beserta PSU dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	

Rencana Strategis (Renstra)
Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2025 - 2029



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Luas Permukiman Kumuh Dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Dipugar (Ha)	1.04.03.1.02.0014 - Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	
			Meningkatnya Penyediaan PSU Permukiman		Persentase satuan perumahan yang sudah dilengkapi PSU (%)	1.04.05 - PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	
				Terlaksananya Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman (Dokumen)	1.04.05.1.01 - Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	
					Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Dalam Rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman (Laporan)	1.04.05.1.01 - Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	
					Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Permukiman yang Terverifikasi dari Pengembang (Laporan)	1.04.05.1.01 - Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	
					Jumlah Lokasi Permukiman yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (Lokasi)	1.04.05.1.01 - Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	
					Jumlah Lokasi PSU Permukiman yang Dilaksanakan Perbaikan (Lokasi)	1.04.05.1.01 - Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman (Dokumen)	1.04.05.1.01.0001 - Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	

Rencana Strategis (Renstra)
Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2025 - 2029



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Dalam Rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman (Laporan)	1.04.05.1.01.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman	
					Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Permukiman yang Terverifikasi dari Pengembang (Laporan)	1.04.05.1.01.0004 - Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dari Pengembang	
					Jumlah Lokasi PSU Permukiman yang Dilaksanakan Perbaikan (Lokasi)	1.04.05.1.01.0008 - Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman	
					Jumlah Lokasi Permukiman yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (Lokasi)	1.04.05.1.01.0009 - Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman	



4.3. Uraian Sub Kegiatan Beserta Kinerja, Indikator, Target, Dan Pagu Indikatif

Sub Kegiatan beserta Kinerja, Indikator, Target dan Pagu Indikatif adalah instrumen kebijakan urusan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh instansi pemerintah. Berdasarkan strategi dan kebijakan, selanjutnya ditetapkan sejumlah sub kegiatan yang merupakan turunan dari program-program dan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan, untuk dilaksanakan sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau sebagai upaya untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Sub Kegiatan yang disusun untuk 5 (lima) tahun kedepan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029, dapat dilihat pada tabel 4.1. sebagaimana berikut:

Rencana Strategis (Renstra)
Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2025 - 2029



Tabel 4.3.
Uraian Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan
Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				130.801.770.830,14		46.218.625.999		46.218.625.999		41.218.625.999		56.218.625.999		
1.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				17.073.625.999,82		20.530.000.000		20.529.625.999		20.530.000.000		20.530.000.000		
Meningkatnya Kualitas Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Predikat)	A	A	17.073.625.999,82	A	20.530.000.000	A	20.529.625.999	A	20.530.000.000	A	20.530.000.000	1.04.0.00.0.0 0.04.0000 - Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	
	Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah (Indeks)	0	79,5		81,74		83,91		86,09		87,39			
	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	83,72	85		85,1		85,15		85,2		85,25			
1.04.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				300.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000		
Tersedianya Laporan / Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat	0	1	300.000.000	1	500.000.000	1	500.000.000	1	500.000.000	1	500.000.000		

Rencana Strategis (Renstra)
Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2025 - 2029



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Daerah (Berita Acara)													
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraa n Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	0	1		1		1		1		1			
1.04.01.1.01.0001 - Penyusunan Dokumen				25.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		

Rencana Strategis (Renstra)
Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2025 - 2029



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Perencanaan Perangkat Daerah														
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	1	1	25.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000		
1.04.01.1.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				25.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1	1	25.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000		
1.04.01.1.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				200.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000		
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1	1	200.000.000	1	300.000.000	1	300.000.000	1	300.000.000	1	300.000.000		
1.04.01.1.01.0009 - Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				25.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		

Rencana Strategis (Renstra)
Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2025 - 2029



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)	0	1	25.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000		
1.04.01.1.01.0010 - Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				25.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		
Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraa n Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	0	1	25.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000		
1.04.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				13.268.625.999,82		15.100.000.000		15.099.625.999		15.100.000.000		15.100.000.000		
Tersedianya Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	1	1	13.268.625.999,82	1	15.100.000.000	1	15.099.625.999	1	15.100.000.000	1	15.100.000.000		
	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			

Rencana Strategis (Renstra)
Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2025 - 2029



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	29	84		84		84		84		84			
1.04.01.1.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				12.218.625.999,82		13.500.000.000		13.499.625.999		13.500.000.000		13.500.000.000		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	29	84	12.218.625.999,82	84	13.500.000.000	84	13.499.625.999	84	13.500.000.000	84	13.500.000.000		
1.04.01.1.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1.000.000.000		1.500.000.000		1.500.000.000		1.500.000.000		1.500.000.000		
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	1	1	1.000.000.000	1	1.500.000.000	1	1.500.000.000	1	1.500.000.000	1	1.500.000.000		
1.04.01.1.02.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				25.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		
Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi	1	1	25.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000		

Rencana Strategis (Renstra)
Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2025 - 2029



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	SKPD (Dokumen)													
1.04.01.1.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				25.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1	25.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000		
1.04.01.1.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				75.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		
Tersedianya Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1	1	75.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000		
	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1	1		1		1		1		1			

Rencana Strategis (Renstra)
Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2025 - 2029



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.04.01.1.03.0002 - Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				25.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		
Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1	1	25.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000		
1.04.01.1.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				25.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		
Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1	1	25.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000		
1.04.01.1.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				25.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1	1	25.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000		
1.04.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				75.000.000		225.000.000		225.000.000		225.000.000		225.000.000		
Tersedianya Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	4	5	75.000.000	15	225.000.000	15	225.000.000	15	225.000.000	15	225.000.000		

Rencana Strategis (Renstra)
Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2025 - 2029



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
1.04.01.1.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				25.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		
Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1	1	25.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000		
1.04.01.1.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				25.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		
Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	1	1	25.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000		
1.04.01.1.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				25.000.000		75.000.000		75.000.000		75.000.000		75.000.000		
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	4	5	25.000.000	15	75.000.000	15	75.000.000	15	75.000.000	15	75.000.000		
1.04.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				745.000.000		970.000.000		970.000.000		970.000.000		970.000.000		

Rencana Strategis (Renstra)
Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2025 - 2029



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	1	1	745.000.000	1	970.000.000	1	970.000.000	1	970.000.000	1	970.000.000		
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penera ngan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Bahan/Materia l yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan	1	1		1		1		1		1			

Rencana Strategis (Renstra)
Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2025 - 2029



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Konsultasi SKPD (Laporan)													
	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1	0		1		0		1		0			
1.04.01.1.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000		
1.04.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan	1	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000		

Rencana Strategis (Renstra)
Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2025 - 2029



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Kantor yang Disediakan (Paket)													
1.04.01.1.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				25.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	1	25.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000		
1.04.01.1.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				180.000.000		180.000.000		180.000.000		180.000.000		180.000.000		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	180.000.000	1	180.000.000	1	180.000.000	1	180.000.000	1	180.000.000		
1.04.01.1.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				25.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1	25.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000		
1.04.01.1.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan				0		15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1	0	0	1	15.000.000	0	15.000.000	1	15.000.000	0	15.000.000		
1.04.01.1.06.0007 - Penyediaan Bahan/Material				25.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		
Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Materia	1	1	25.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000		

Rencana Strategis (Renstra)
Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2025 - 2029



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	l yang Disediakan (Paket)													
1.04.01.1.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu				25.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		
Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	1	1	25.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000		
1.04.01.1.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				365.000.000		400.000.000		400.000.000		400.000.000		400.000.000		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	1	365.000.000	1	400.000.000	1	400.000.000	1	400.000.000	1	400.000.000		
1.04.01.1.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				25.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		
Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	1	1	25.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000		
1.04.01.1.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				25.000.000		75.000.000		75.000.000		75.000.000		75.000.000		
Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	1	1	25.000.000	1	75.000.000	1	75.000.000	1	75.000.000	1	75.000.000		

Rencana Strategis (Renstra)
Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2025 - 2029



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.04.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang				175.000.000		1.050.000.000		1.050.000.000		1.050.000.000		1.050.000.000		
Urusan Pemerintah Daerah														
Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	0	1	175.000.000	1	1.050.000.000	1	1.050.000.000	1	1.050.000.000	1	1.050.000.000		
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan (Unit)	3	1		1		1		1		1			
	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	4	1		1		1		1		1			
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung	1	1		1		1		1		1			

Rencana Strategis (Renstra)
Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2025 - 2029



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)													
1.04.01.1.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				25.000.000		400.000.000		400.000.000		400.000.000		400.000.000		
Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	0	1	25.000.000	1	400.000.000	1	400.000.000	1	400.000.000	1	400.000.000		
1.04.01.1.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				25.000.000		400.000.000		400.000.000		400.000.000		400.000.000		
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	4	1	25.000.000	1	400.000.000	1	400.000.000	1	400.000.000	1	400.000.000		
1.04.01.1.07.0005 - Pengadaan Mebel				25.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	0	1	25.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000		
1.04.01.1.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				25.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	1	25.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000		
1.04.01.1.07.0007 - Pengadaan Aset Tetap Lainnya				25.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		
Tersedianya Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap	3	1	25.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000		

Rencana Strategis (Renstra)
Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2025 - 2029



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Lainnya yang Disediakan (Unit)													
1.04.01.1.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				25.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	1	25.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000		
1.04.01.1.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				25.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	1	25.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000		
1.04.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				2.260.000.000		2.260.000.000		2.260.000.000		2.260.000.000		2.260.000.000		
Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	1	2.260.000.000	1	2.260.000.000	1	2.260.000.000	1	2.260.000.000	1	2.260.000.000		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang	1	1		1		1		1		1			

Rencana Strategis (Renstra)
Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2025 - 2029



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Disediakan (Laporan)													
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
1.04.01.1.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000		
1.04.01.1.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				360.000.000		360.000.000		360.000.000		360.000.000		360.000.000		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1	1	360.000.000	1	360.000.000	1	360.000.000	1	360.000.000	1	360.000.000		
1.04.01.1.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000		
Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan	1	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000		

Rencana Strategis (Renstra)
Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2025 - 2029



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)													
1.04.01.1.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				1.870.000.000		1.870.000.000		1.870.000.000		1.870.000.000		1.870.000.000		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	1	1.870.000.000	1	1.870.000.000	1	1.870.000.000	1	1.870.000.000	1	1.870.000.000		
1.04.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				175.000.000		275.000.000		275.000.000		275.000.000		275.000.000		
Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	1	1	175.000.000	1	275.000.000	1	275.000.000	1	275.000.000	1	275.000.000		
	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi (Unit)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi (Unit)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Peralatan dan	5	1		5		5		5		5			

Rencana Strategis (Renstra)
Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2025 - 2029



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)													
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	2	1		2		2		2		2			
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi (Unit)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit)	5	1		5		5		5		5			
1.04.01.1.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	1	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000		
1.04.01.1.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan				25.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		

Rencana Strategis (Renstra)
Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2025 - 2029



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	2	1	25.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000		
1.04.01.1.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	5	1	25.000.000	5	25.000.000	5	25.000.000	5	25.000.000	5	25.000.000		
1.04.01.1.09.0007 - Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000		
Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit)	5	1	25.000.000	5	25.000.000	5	25.000.000	5	25.000.000	5	25.000.000		
1.04.01.1.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				25.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi (Unit)	1	1	25.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000		
1.04.01.1.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				25.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		

Rencana Strategis (Renstra)
Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2025 - 2029



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi (Unit)	1	1	25.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000		
1.04.01.1.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				25.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi (Unit)	1	1	25.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000		
1.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN				220.000.000		3.239.000.000		3.239.000.000		3.239.000.000		4.239.000.000		
Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program pemerintah	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (%)	100	100	220.000.000	100	3.239.000.000	100	3.239.000.000	100	3.239.000.000	100	4.239.000.000	1.04.0.00.0.0 0.04.0000 - Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	
	Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni (%)	100	100		100		100		100		100			
1.04.02.1.01 - Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana				50.000.000		250.000.000		250.000.000		250.000.000		250.000.000		

Rencana Strategis (Renstra)
Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2025 - 2029



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
atau Relokasi Program Provinsi														
Terlaksananya Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi yang Terverifikasi (Dokumen)	0	0	50.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000		
	Jumlah Dokumen Data Lahan yang Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan (Dokumen)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Provinsi (Dokumen)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Provinsi (Dokumen)	0	0		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani (Dokumen)	0	1		1		1		1		1			
1.04.02.1.01.0002 - Identifikasi Lahan-Lahan				10.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		

Rencana Strategis (Renstra)
Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2025 - 2029



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan														
Tersusunnya Dokumen Data Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Jumlah Dokumen Data Lahan yang Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan (Dokumen)	0	1	10.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000		
1.04.02.1.01.0003 - Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani				30.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		
Tersusunnya Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani (Dokumen)	0	1	30.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000		
1.04.02.1.01.0008 - Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Provinsi				0		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		
Tersusunnya Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Provinsi	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Provinsi (Dokumen)	0	0	0	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000		
1.04.02.1.01.0010 - Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi				0		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		
Tersusun dan Terverifikasinya Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi	Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban	0	0	0	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000		

Rencana Strategis (Renstra)
Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2025 - 2029



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Bencana Provinsi yang Terverifikasi (Dokumen)													
1.04.02.1.01.0011 - Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Provinsi				10.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		
Tersusunnya Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Provinsi	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Provinsi (Dokumen)	0	1	10.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000		
1.04.02.1.02 - Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi				20.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		
Terlaksananya Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Jumlah Dokumen Data Penerima Bantuan Berdasarkan Jenis Layanan (Dokumen)	0	1	20.000.000	0	50.000.000	0	50.000.000	0	50.000.000	0	50.000.000		
	Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana (Orang)	0	10		50		50		50		50			
1.04.02.1.02.0001 - Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana				10.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		

Rencana Strategis (Renstra)
Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2025 - 2029



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersosialisasinya Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	Jumlah Orang/Sukarel awan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana (Orang)	0	10	10.000.000	50	50.000.000	50	50.000.000	50	50.000.000	50	50.000.000		
1.04.02.1.02.0006 - Koordinasi untuk Menyepakati Penerima dan Jenis Pelayanan				10.000.000		0		0		0		0		
Tersusunnya Dokumen Data Penerima Bantuan Berdasarkan Jenis Layanan	Jumlah Dokumen Data Penerima Bantuan Berdasarkan Jenis Layanan (Dokumen)	0	1	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.04.02.1.03 - Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi				100.000.000		2.889.000.000		2.889.000.000		2.889.000.000		3.889.000.000		
Terlaksananya Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Jumlah Rumah Tangga Korban Bencana Provinsi yang Mendapatkan Fasilitas Penyediaan Rumah (Rumah Tangga)	0	0	100.000.000	5	2.889.000.000	5	2.889.000.000	5	2.889.000.000	5	3.889.000.000		
	Jumlah Rumah Korban Bencana Provinsi yang Terehabilitasi (Unit Rumah)	0	1		0		0		0		10			
	Jumlah Rumah Khusus beserta PSU	0	1		5		5		5		5			

Rencana Strategis (Renstra)
Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2025 - 2029



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	bagi Korban Bencana Provinsi (Unit Rumah)													
	Jumlah Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Provinsi yang Terbangun (Unit Rumah)	0	0		2		2		2		2			
	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Provinsi yang Terbangun (Unit Rumah)	0	5		0		0		0		0			
	Jumlah Rumah Tangga yang Terdampak Relokasi Program Provinsi yang Mendapatkan Fasilitasi Penyediaan Rumah (Rumah Tangga)	0	0		2		2		2		2			
1.04.02.1.03.0001 - Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana				40.000.000		0		0		0		1.000.000.000		
Terehabilitasinya Rumah bagi Korban Bencana Provinsi	Jumlah Rumah Korban Bencana Provinsi yang Terehabilitasi (Unit Rumah)	0	1	40.000.000	0	0	0	0	0	0	10	1.000.000.000		
1.04.02.1.03.0004 - Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana				50.000.000		0		0		0		0		
Terbangunnya Rumah bagi Korban Bencana Provinsi	Jumlah Rumah bagi Korban	0	5	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0		

Rencana Strategis (Renstra)
Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2025 - 2029



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Bencana Provinsi yang Terbangun (Unit Rumah)													
1.04.02.1.03.0007 - Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Korban Bencana Provinsi				0		60.000.000		60.000.000		60.000.000		60.000.000		
Terfasilitasinya Penyediaan Rumah bagi Korban Bencana Provinsi	Jumlah Rumah Tangga Korban Bencana Provinsi yang Mendapatkan Fasilitasi Penyediaan Rumah (Rumah Tangga)	0	0	0	5	60.000.000	5	60.000.000	5	60.000.000	5	60.000.000		
1.04.02.1.03.0008 - Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Provinsi				0		700.000.000		700.000.000		700.000.000		700.000.000		
Terbangunnya Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Provinsi	Jumlah Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Provinsi yang Terbangun (Unit Rumah)	0	0	0	2	700.000.000	2	700.000.000	2	700.000.000	2	700.000.000		
1.04.02.1.03.0010 - Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Provinsi				0		24.000.000		24.000.000		24.000.000		24.000.000		
Terfasilitasinya Penyediaan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Pemerintah Provinsi	Jumlah Rumah Tangga yang Terdampak Relokasi Program Provinsi yang Mendapatkan Fasilitasi Penyediaan Rumah	0	0	0	2	24.000.000	2	24.000.000	2	24.000.000	2	24.000.000		

Rencana Strategis (Renstra)
Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2025 - 2029



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	(Rumah Tangga)													
1.04.02.1.03.0012 - Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Provinsi				10.000.000		2.105.000.000		2.105.000.000		2.105.000.000		2.105.000.000		
Terbangunnya Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Provinsi	Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Provinsi (Unit Rumah)	0	1	10.000.000	5	2.105.000.000	5	2.105.000.000	5	2.105.000.000	5	2.105.000.000		
1.04.02.1.04 - Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi				50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		
Terlaksananya Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraa n Perumahan (Laporan)	0	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000		
1.04.02.1.04.0004 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Perumahan				50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraa n Perumahan (Laporan)	0	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000		
1.04.03 - PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN				12.915.459.116,07		7.700.000.000		7.750.000.000		7.700.000.000		7.750.000.000		
Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	Persentasi Luas kawasan kumuh 10 à€“ 15 Ha yang ditangani (%)	0	5,5	12.915.459.116,07	9,17	7.700.000.000	12,83	7.750.000.000	16,5	7.700.000.000	20,16	7.750.000.000	1.04.0.00.0.0 0.04.0000 - Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	
	Jumlah Rumah Layak	21	100		100		100		100		100			

Rencana Strategis (Renstra)
Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2025 - 2029



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Huni Yang Di Bangun (Unit)													
1.04.03.1.01 - Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha				1.040.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		
Terlaksananya Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/ Terlegalisasi (Dokumen)	0	1	1.040.000.000	0	150.000.000	0	150.000.000	0	150.000.000	0	150.000.000		
	Jumlah Rumah Tangga yang Terfasilitasi Peningkatan Kesadaran dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah (Rumah Tangga)	0	10		50		50		50		50			
	Jumlah Orang yang Mengikuti Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya a Permukiman Kumuh (Orang)	0	10		50		50		50		50			
	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraa n Kawasan	1	1		1		1		1		1			

Rencana Strategis (Renstra)
Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2025 - 2029



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Permukiman (Laporan)													
1.04.03.1.01.0008 - Penyusunan/Review/Legalisi asi Kebijakan Bidang PKP				1.000.000.000		0		0		0		0		
Tersusun/Tereview/Terlegali sasinya Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tere view/ Terlegalisasi (Dokumen)	0	1	1.000.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.04.03.1.01.0017 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman				20.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraa n Kawasan Permukiman (Laporan)	1	1	20.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000		
1.04.03.1.01.0018 - Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman kumuh				10.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		
Meningkatnya Kesadaran Publik dalam Rangka Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Jumlah Orang yang Mengikuti Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangny a Permukiman Kumuh (Orang)	0	10	10.000.000	50	50.000.000	50	50.000.000	50	50.000.000	50	50.000.000		
1.04.03.1.01.0019 - Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah				10.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		

Rencana Strategis (Renstra)
Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2025 - 2029



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Rumah Tangga yang Terfasilitasi Peningkatan Kesadaran dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah (Rumah Tangga)	0	10	10.000.000	50	50.000.000	50	50.000.000	50	50.000.000	50	50.000.000		
1.04.03.1.02 - Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha				11.875.459.116,07		7.550.000.000		7.600.000.000		7.550.000.000		7.600.000.000		
Terlaksananya Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha (Unit Rumah)	2	20	11.875.459.116,07	10	7.550.000.000	10	7.600.000.000	10	7.550.000.000	10	7.600.000.000		
	Jumlah Dokumen Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU dalam Kawasan Permukiman	0	1		1		1		1		1			

Rencana Strategis (Renstra)
Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2025 - 2029



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha (Dokumen)													
	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Pe remajaan/Pem ukiman Kembali Permukiman Kumuh dan Terhadap Tumbuh dan Berkembangny a Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha (Laporan)	0	1		0		1		0		1			
	Luas Permukiman Kumuh Dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Dipugar (Ha)	272,76	10		10		10		10		10			

Rencana Strategis (Renstra)
Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2025 - 2029



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Diperbaiki (Unit Rumah)	19	80		90		90		90		90			
1.04.03.1.02.0002 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/ Peremajaan/ Pemukiman Kembali Permukiman Kumuh dan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha				10.000.000		0		50.000.000		0		50.000.000		
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan/Permukiman Kembali Permukiman Kumuh dan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan/Permukiman Kembali Permukiman Kumuh dan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	0	1	10.000.000	0	0	1	50.000.000	0	0	1	50.000.000		

Rencana Strategis (Renstra)
Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2025 - 2029



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha (Laporan)													
1.04.03.1.02.0003 - Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha				8.200.000.000		4.500.000.000		4.500.000.000		4.500.000.000		4.500.000.000		
Terlaksananya Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Diperbaiki (Unit Rumah)	19	80	8.200.000.000	90	4.500.000.000	90	4.500.000.000	90	4.500.000.000	90	4.500.000.000		
1.04.03.1.02.0011 - Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha				1.500.000.000		2.000.000.000		2.000.000.000		2.000.000.000		2.000.000.000		
Terbangunnya Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan	2	20	1.500.000.000	10	2.000.000.000	10	2.000.000.000	10	2.000.000.000	10	2.000.000.000		

Rencana Strategis (Renstra)
Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2025 - 2029



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha (Unit Rumah)													
1.04.03.1.02.0012 - Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni beserta PSU dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha				10.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		
Terlaksananya Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah Dokumen Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha (Dokumen)	0	1	10.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000		
1.04.03.1.02.0014 - Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha				2.155.459.116,07		1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		
Terlaksananya Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Luas Permukiman Kumuh Dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Dipugar (Ha)	272,76	10	2.155.459.116,07	10	1.000.000.000	10	1.000.000.000	10	1.000.000.000	10	1.000.000.000		

Rencana Strategis (Renstra)
Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2025 - 2029



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.04.05 - PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)				100.592.685.714,25		14.749.625.999		14.700.000.000		9.749.625.999		23.699.625.999		
Meningkatnya Penyediaan PSU Permukiman	Persentase satuan perumahan yang sudah dilengkapi PSU (%)	52,66	53,25	100.592.685.714,25	53,5	14.749.625.999	53,75	14.700.000.000	54	9.749.625.999	54,25	23.699.625.999	1.04.0.00.0.0 0.04.0000 - Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	
1.04.05.1.01 - Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman				100.592.685.714,25		14.749.625.999		14.700.000.000		9.749.625.999		23.699.625.999		
Terlaksananya Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Dalam Rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman (Laporan)	1	1	100.592.685.714,25	1	14.749.625.999	1	14.700.000.000	1	9.749.625.999	1	23.699.625.999		
	Jumlah Lokasi PSU Permukiman yang Dilaksanakan Perbaikan (Lokasi)	0	150		10		10		10		10			
	Jumlah Lokasi Permukiman yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (Lokasi)	250	200		50		50		40		60			
	Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Permukiman yang Terverifikasi dari Pengembang (Laporan)	0	1		1		1		1		1			

Rencana Strategis (Renstra)
Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2025 - 2029



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman (Dokumen)	0	1		1		1		1		1			
1.04.05.1.01.0001 - Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman				4.775.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman (Dokumen)	0	1	4.775.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000		
1.04.05.1.01.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman				10.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Dalam Rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman (Laporan)	1	1	10.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000		
1.04.05.1.01.0004 - Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dari Pengembang				10.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		
Terlaksananya Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dari Pengembang	Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Permukiman yang Terverifikasi dari Pengembang (Laporan)	0	1	10.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000		

Rencana Strategis (Renstra)
Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2025 - 2029



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.04.05.1.01.0008 - Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman				7.850.685.361,6		500.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000		
Terlaksananya Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman	Jumlah Lokasi PSU Permukiman yang Dilaksanakan Perbaikan (Lokasi)	0	150	7.850.685.361,6	10	500.000.000	10	500.000.000	10	500.000.000	10	500.000.000		
1.04.05.1.01.0009 - Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman				87.947.000.352,65		13.949.625.999		13.900.000.000		8.949.625.999		22.899.625.999		
Tersedianya Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman	Jumlah Lokasi Permukiman yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (Lokasi)	250	200	87.947.000.352,65	50	13.949.625.999	50	13.900.000.000	40	8.949.625.999	60	22.899.625.999		



4.4. Uraian Sub Kegiatan Dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029, mengampu pelaksanaan sejumlah program prioritas yang tertuang dalam dokumen RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029. Program-program tersebut dirancang untuk menjawab isu-isu strategis daerah, memperkuat pencapaian visi dan misi kepala daerah, serta mendukung arah kebijakan pembangunan nasional dan provinsi. Melalui peran ini, Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029, memastikan bahwa perencanaan pembangunan daerah dilakukan secara terarah, terpadu, berbasis data, serta mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berkualitas dan pembangunan yang berdampak nyata bagi masyarakat. Sub Kegiatan yang disusun untuk 5 (lima) tahun kedepan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029, sebanyak 72 (tujuh puluh dua) sub kegiatan.

Sub Kegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah untuk 5 (lima) tahun kedepan dalam percepatan pembangunan infrastruktur dasar di pulau-pulau terluar dan perbatasan, pada Program Kawasan Permukiman di Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha, pada Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha, Sub Kegiatan Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha



sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha, dan Sub Kegiatan Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha.

Subkegiatan Prioritas dalam mendukung program prioritas pembangunan daerah, dapat dilihat pada tabel 4.4. sebagai berikut:



Tabel 4.4.
Uraian Sub Kegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah
Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029

No.	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
1	2	3	4	5
1.04.0.00.0.00.04.0000 - Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman				
1.	Lingkungan (Kawasan Kumuh dan Tidak Layak Huni, IPAL)	Revitalisasi Kawasan Kumuh dan Tidak Layak Huni	1.04.03-Program Kawasan Permukiman	Bidang Kawasan Permukiman
			1.04.03.1.02 - Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	
			1.04.03.1.02.0003 - Perbaiki Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	
			1.04.03.1.02.0011 - Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	
			1.04.03.1.02.0014 - Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha.	

Rencana Strategis (Renstra)
Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2025 - 2029



No.	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
1	2	3	4	5
2.	Pembangunan Infrastruktur	Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar di Pulau-Pulau Terluar dan Perbatasan	1.04.05 - Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)/Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU/Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman 1.04.05.1.01 - Urusan Penyelenggaraan PSU 1.04.05.1.01.0009 - Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	Bidang Prasarana Sarana Utilitas Umum (PSU)



4.5. Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan Dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah

Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029 merupakan indikator yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029 dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029 sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai. Sasaran Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029 yaitu **“Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Perumahan Dan Kawasan Permukiman Yang Layak, Terjangkau Dan Berkelanjutan”** dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) berkait langsung dengan pencapaian Indikator Kinerja Perangkat Daerah, yang dapat dilihat pada tabel 4.3. sebagai berikut:

Tabel 4.5.
Indikator Kinerja Utama (IKU)
Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2025-2029

No	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Rumah Tangga Dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau Dan Berkelanjutan	Persentase (%)	59,72	60,72	63,72	66,72	69,72	72,72	



4.6. Target Kinerja Penyelenggara Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025–2029, Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau berperan penting dalam melaksanakan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi, yang menjadi tolok ukur utama keberhasilan pembangunan daerah. IKK yang diampu oleh Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau mencerminkan peran strategis lembaga ini dalam memastikan keterpaduan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pengendalian dan evaluasi pembangunan yang menjadi kewenangannya. Melalui pelaksanaan IKK tersebut, Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau tidak hanya menjamin konsistensi dan akuntabilitas dokumen perencanaan, tetapi juga mendorong terwujudnya pembangunan yang berorientasi hasil, berbasis data, serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan dinamika wilayah.

Indikator Kinerja Kunci (IKK) *Outcome* Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029 di lihat pada tabel 4.6. sebagai berikut:

Rencana Strategis (Renstra)
Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2025 - 2029



Tabel 4.6.
Indikator Kinerja Kunci (IKK) Outcome
Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2025-2029

No	INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK) OUTCOME	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN									
2.	Persentase Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni	Persentase (%)	100	100	100	100	100	100	100	Bidang Perumahan
3.	Persentase Warga Negara yang Terkena Relokasi Akibat Program Pemerintah Daerah Provinsi yang Memperoleh Fasilitas Penyediaan Rumah Yang Layak Huni	Persentase (%)	100	100	100	100	100	100	100	Bidang Perumahan
4.	Persentase Luas Kawasan Kumuh 10-15 Ha yang ditangani	Persentase (%)	0	1,83	5,50	9,17	12,83	16,50	20,16	Bidang Kawasan Permukiman
5.	Persentase Satuan Perumahan yang Sudah Dilengkapi PSU	Persentase (%)	52,66	53,00	53,25	53,50	53,75	54,00	54,25	Bidang Prasarana Sarana Utilitas (PSU) Umum
6.	Jumlah Rumah Layak Huni Yang Di Bangun	Unit	21	100	100	100	100	100	100	Bidang Kawasan Permukiman
7.	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	A	A	A	A	A	A	A	Bidang Sekretariat
8.	Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	Indeks	0	77,39	79,50	81,74	83,91	86,09	87,39	Bidang Sekretariat
9.	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	83,72	84,98	85,00	85,10	85,15	85,20	85,25	Bidang Sekretariat



BAB V

PENUTUP

Arah kebijakan perangkat daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran rencana strategis (Renstra) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029, merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang cara mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Arah kebijakan merupakan respon terhadap tujuan dan sasaran yang ditetapkan yang akan menjadi rujukan dalam perumusan program dan kegiatan, demi mewujudkan Visi dan Misi pada RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029.

Dokumen Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029 secara normatif telah diupayakan memuat program-program atau rencana kerja 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau. Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029 memuat kebijakan strategis daerah serta prediksi keuangan untuk 5 (lima) tahun kedepan.

Beberapa indikator keberhasilan pelaksanaan juga telah ditetapkan sebagai target yang harus dicapai. Untuk implementasi Renstra tersebut dibutuhkan komitmen yang tinggi, kerja keras, dedikasi, loyalitas & integritas dari seluruh jajaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau.

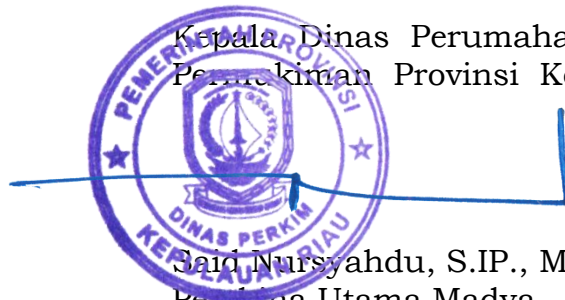
Dokumen ini dirancang berdasarkan visi, misi, serta tujuan pembangunan yang sejalan dengan RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029, serta mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan memperhatikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, inovasi, dan keberpihakan kepada masyarakat,



diharapkan menjadi landasan yang kokoh bagi pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau, dalam mendukung terwujudnya Kepulauan Riau Maju, Makmur dan Merata.

Tanjungpinang, September 2025

Kepala Dinas Perumahan Dan Kawasan
Permukiman Provinsi Kepulauan Riau,



Said Nursyahdu, S.IP., M.T.
Pembina Utama Madya
NIP. 19720618 200012 1 004